



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TANDAR PA'BAJI' DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KELURAHAN PULAU KIJANG (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH)

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga



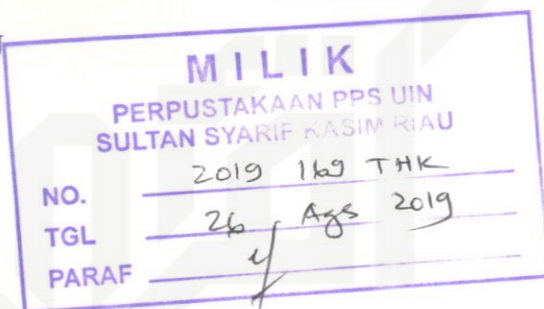
UIN SUSKA RIAU

Oleh :

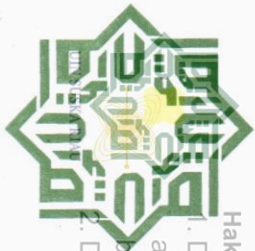


SUDIRMAN

NIM: 21692104885



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H/2019 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

Sudirman
 21692104885
 M.H. (Magister Hukum)
 Standar PA'BAJI' dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di
 Kelurahan Pulau Kijang.

Dr. Rusdi, MA
 Ketua

Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd
 Sekretaris

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
 Penguji I

Dr. H. Zailani, M.Ag
 Penguji II

Tanggal Ujian/Pengesahan 16 Juli 2019



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Standar Pa’baji Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reteh (Tinjauan Maqasyid al-Syari’ah)”** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Sudirman
NIM : 21692104885
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwâl Syakhshiyah)
Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwâl Syakhshiyah)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 16 Juli 2019.

Penguji I,

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 19670822 199803 1 001

Tgl: 15 Agustus 2019

Penguji II

Dr. Zailani, M.A
NIP. 19720427 1998031 002

Tgl: 16 Agustus 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 19670822 199803 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“SETANDAR PA’BAJI’ DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KELURAHAN PULAU KIJANG (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH)”** yang ditulis oleh:

Nama : Sudirman
 NIM : 21692104885
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)
 Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 6 April 2019
 Pembimbing I,


Dr. Andi Murniati, M.Pd
 NIP. 19650817 199402 2 001

Tanggal: 6 April 2019
 Pembimbing II,


Dr. Erman, M. Ag
 NIP. 19770311 201101 1 002

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Junaidi Lbs, M. Ag
 NIP. 19670822 199803 1 001

Hak Cipta Diilang Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Erman, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
Sudirman

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Sudirman
NIM : 21692104885
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)
Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : Setandar *Pa' baji* Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kelurahan Pulau Kijang (Tinjaun Maqashid Al-Syari'ah)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 06 April 2019
Pembimbing II,


Dr. Erman, M. Ag
NIP.19751217 200112 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Sudirman
NIM : 21692104885
Tempat/ Tanggal Lahir : Benteng, 21 April 1986
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwâl Syakhshiyah)
Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwâl Syakhshiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **"Standar Pa'baji Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reteh (Tinjauan Maqasyid al-Syari'ah)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 12 Agustus 2019



SUDIRMAN
NIM. 21692104885

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul :“ **SETANDAR PA’BAJI’ DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KELURAHAN PULAU KIJANG (TINJAUAN MAQASHID AL-SYARÎ’AH)**”

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Muhasyim, Ibunda Mariyati, Kakek H.Sajad yang selalu mendo’akan penulis dan memberikan dorongan moril dalam menimba ilmu pengetahuan sertadalam penyelesaian penulisan Tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Akhmad Mubahidin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau,
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Afrizal M.,MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Yang terhormat Bapak Dr. Junaidi Lbs, M.Ag, Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan izin dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Andi Murniati, M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan waktu, motivasi dan ilmunya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Bapak Dr. Erman Gani, M.A, selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan waktu, motivasi dan ilmunya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Seluruh Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan ilmunya selamakuliah.

8. Bapak dan Ibu Staff PPs dan Staff Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

9. Kepada H.Muhammad Yunus, S.Ag, M.Sh, H.Samsuddin, Lc dan kerabat lainnya serta sahabat-sahabat saya yang telah sudi memberikan dorongan, motivasi dan do'a terbaik kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan.

10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Angkatan 2017 yang selalu saling mendukung sejak awal kuliah sampai dengan sekarang.

11. Semuapihak yang telah membantu dan mendukung selama studi dan terselesaikannya tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Kiranya menjadi amal sholeh disisi Allah SWT. Aamiin

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan



senang hati, demi perbaikan penulisan di masa yang akandatang. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 05 April 2019

SUDIRMAN
NIM: 21692104885



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tungga

ا	= a	ر	= r	ف	= f
ب	= b	ز	= z	ق	= q
ت	= t	ش	= s	ك	= k
ث	= ts	س	= sy	ل	= l
ج	= j	ص	= sh	م	= m
ح	= h	ض	= dh	ن	= n
خ	= kh	ط	= th	و	= w
د	= d	ظ	= zh	ه	= h
ذ	= dz	ع	= ‘	ء	= ‘
		غ	= gh	ي	= y

b. Vokal Panjang (*madd*) a = ā

c. Vokal Panjang (*madd*) i = ī

d. Vokal Panjang (*madd*) u = ū

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap , misalnya العامة ditulis *al-‘ammah*.

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syarī’ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibāli*, dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*zhulūman*).

4. Vokal Rangkap

او di tulis *aw*, او di tulis *uw*, أي di tulis *ay*, dan اي di tulis *iy*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Hak Cipta Diindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' Marbuthah

Ta' Marbuthah yang dimatikan di tulis h, misalnya شريعة ditulis *syarī'ah*, kecuali telah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mayit*, bila dihidupkan ditulis t *al-maytatu* dalam tulisan Arabnya; الميثة

6. Kata Sandang Alif Lam

Alim Lam yang di ikuti oleh huruf *Qomariyyah* dan *Syamsiyyah*, ditulis *al-*, misalnya المسلم ditulis *al-Muslimu*, kecuali untuk Nama diri yang diikuti oleh kata Allah, misalnya 'Abdullah (عبدالله).

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besardisesuaikandenganEjaan Yang Disempurnakan (EYD)

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Judul	
Pengesahan Penguji	
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Singkatan	vi
Pedoman Transliterasi.....	vii
Abstrak	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian.....	11
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	14
3. Asas-Asas Pernikahan.....	17
B. Rukun, syarat, dan sah pernikahan.....	21
C. Syarat Sahnya Perkawinan.....	25
D. Pengertian <i>Ta'aruf</i>	39
1. Khitbah (meminang).....	41
2. Hukum Peminaan dan Hikmahnya.....	46
E. Pentingnya Keluarga.....	47
F. Pengertian Maqshid al-Syari'ah.....	50
G. Tokoh Kajian Maqashid Al-Syari'ah.	55
1. Pembagian Maqashid Al-Syari'ah.....	58

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi penelitian.....	75
1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Pulau Kijang.....	75
2. Geografis.....	78
B. Populasi dan Sumber Penelitian.....	80
C. Metode penelitan.....	93
D. Kerangka Pemikiran.....	95



BAB IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kedudukan standar <i>pa' baji</i> perkawinan suku Bugis.....	97
1. Mattiro (menjadi tamu).....	100
2. Mamanu'-manu'	101
3. Ma'duta Mallino	102
4. Hantaran.....	104
B. Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Bugis di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh. Kab. Inra Giri Hilir tentang setandar <i>pa' baji</i> (uang jujuran).....	107
1. Pengertian Sompas dan Pa'baji' serta perbedaannya.....	108
C. Hukum maqosid syari'ah tentang <i>pa' baji</i> atau jujuran lamaran dalam hukum Islam.....	116

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN

- = dan kawan-kawan
- = Hijrah
- = Hadits Riwayat
- = halaman
- = Kompilasi Hukum Islam
- = Qur'an Surat
- = Shallallahu 'alaihi wa sallam
- = Subhanahu wa Ta'ala
- = Undang-Undang



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tungga

ا	= a	ر	= r	ف	= f
ب	= b	ز	= z	ق	= q
ت	= t	ش	= s	ك	= k
ث	= ts	س	= sy	ل	= l
ج	= j	ص	= sh	م	= m
ح	= h	ض	= dh	ن	= n
خ	= kh	ط	= th	و	= w
د	= d	ظ	= zh	ه	= h
ذ	= dz	ع	= ‘	ء	= ‘
		غ	= gh	ي	= y

b. Vokal Panjang (*madd*) a = ā

c. Vokal Panjang (*madd*) i = ī

d. Vokal Panjang (*madd*) u = ū

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap , misalnya العامة ditulis *al-‘ammah*.

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syarī’ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibāli*, dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*zhulūman*).

4. Vokal Rangkap

او di tulis *aw*, أو di tulis *uw*, أي di tulis *ay*, dan اي di tulis *iy*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ta' Marbuthah

Ta' Marbuthah yang dimatikan di tulis h, misalnya شريعة ditulis *syarī'ah*, kecuali telah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mayit*, bila dihidupkan ditulis t *al-maytatu* dalam tulisan Arabnya; الميثة

3. Kata Sandang Alif Lam

Alim Lam yang di ikuti oleh huruf *Qomariyyah* dan *Syamsiyyah*, ditulis *al-*, misalnya المسلم ditulis *al-Muslimu*, kecuali untuk Nama diri yang diikuti oleh kata Allah, misalnya 'Abdullah (عبدالله).

4. Huruf Besar

Penulisan huruf besardisesuaikandenganEjaan Yang Disempurnakan (EYD)



ABSTRAK

Pa' baji adalah uang jujuran ataupun uang antaran dalam sistem perkawinan adat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang *pa' baji* atau *uang jujuran* dalam perkawinan adat Bugis. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui landasan yuridis dalam penetapan *pa' baji* dalam perkawinan adat Bugis Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh. Untuk mengkaji permasalahan di atas digunakan metode penelitian melalui pendekatan historis, komparasi, dan penelitian kepustakaan serta penelaan terhadap artikel-artikel yang dianggap mempunyai kaitan yang relevan dengan masalah yang diteliti mengenai pemberian *pa' baji*. Penelitian melalui teknik wawancara dimana responden dipilih dengan cara purposive. Selanjutnya berdasarkan data dari hasil wawancara yang ada, penulis berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Riau dan Kantor Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Reteh. Sumber data dalam penelitian ini antara lain hasil wawancara dengan, masyarakat Pulau Kijang, Pemerhati Budaya dan Tokoh Adat.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masyarakat Bugis khususnya di Kelurahan Pulau Kijang menganggap bahwa uang *pa' baji* atau *uang panai* adalah tradisi pemberian uang yang wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan. Tujuannya untuk memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. *Pa' baji* dalam perkawinan adat bugis adalah salah satu pra syarat, karena jika tidak ada uang *pa' baji* maka tidak ada perkawinan. Islam tidak mengatur mengenai ketentuan *uang pa' baji* yang di kenal *uang panai* akan tetapi hukumnya mubah selama itu tidak dipaksa. Islam tidak melarang pemberian uang *pa' baji* dalam perkawinan adat bugis karena tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Yang penting pemberian *pa' baji* tidak bertentangan dengan syariat. *Pa' baji* tidak ada unsur keterpaksaan, sesuai kemampuan dan kesanggupan pihak lakilaki.

Kata kunci : *Pa' baji* , Perkawinan, Masyarakat Bugis, Pulau Kijang, *Maqâsyid al-Syarî'ah*.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

The Standards of *Pa'baji* for Bugis Marriage in Pulau Kijang Village (The Review of *Maqasyid al-Shari'ah*)

Pa'baji is 'The Delivery Money' system of Bugis Traditional marriage in Pulau Kijang Village, Reteh Subdistrict. This study aims to find out the views of Islamic law regarding on *pa'baji* in Bugis Traditional marriage. In addition, this research is also intended to find out the juridical foundation in the establishment of *pa'baji* in Bugis traditional marriage in Pulau Kijang Village, Reteh Subdistrict. To examine the research problems, the method through historical and comparative library research approaches, as well as reviews of articles that are considered to have relevance to the research problem are used. The data collection technique used is interview, and the research participants were chosen by purposive sampling. Furthermore, based on the data from the interviews, the researcher draw conclusions from specific facts to a more general one. This research was conducted at the one-stop Investment and Integrated Services Office of Riau Province and at Indragiri Hilir Regency Office in Reteh Subdistrict. The data sources in this study are the results of interviews with the people in Pulau Kijang village, culture observer and customary figures.

Based on the results of the study, it is revealed that Bugis people, especially in Pulau Kijang Village, consider that *pa'baji* money or *panaim* money is a compulsory money tradition given by man to woman to be used as a fee to carry out wedding parties. The aim is to give respect to the family of the woman. *Pa'baji* in a Bugis traditional marriage is one of the pre-conditions because if there is no *pa'baji* money then there is no marriage. Islam does not regulate the provisions of *pa'baji* money but the law is changed as long as it is not forced. Islam does not prohibit the provision of *pa'baji* money in Bugis traditional marriage because there is no argument that explains it. The thing is that the giving of *pa'baji* is not against the *Shari'a*. *Pa'baji* has no element of compulsion, but it should be based on the abilities of men.

Keywords: *Pa'baji* ', Marriage, Bugis Society, Pulau Kijang, *Maqâsyid al-Syarî'ah*.



ملخص

سودرمان، (2019): معيار *Pa'baji* في الزواج عند المجتمع البوغي في قرية فولو كيجانج (نظارة مقاصد الشريعة)

Pa'baji هو النقود المعطي في نظام الزواج عند ثقافة البوغي في قرية فولو كيجانج منطقة رتيه. هدف هذا البحث لمعرفة نظرية حكم الإسلام عن *Pa'baji* في الزواج عند ثقافة البوغي. جانب ذلك، هدف هذا البحث كذلك لمعرفة أساس الصلاحية في تكوين *Pa'baji* في الزواج عند ثقافة البوغي في قرية فولو كيجانج منطقة رتيه. للبحث تلك المشكلة استخدم الباحث طريقة البحث بوسيلة الجانب التاريخي، المقارنة، و البحث المكتبي وكذلك مطالعة المقالات المتعلقة بالمشكلة عن إعطاء *Pa'baji*. طريقة جمع البيانات هي المقابلة والمقابل عنها يختار على سبيل مفيد. ثم مؤسسا على بيانات المقابلة، أخذ الباحث الخلاصة من الحقائق الخاصة تكون خلاصة عامة. مكان البحث هو المكتب لمؤالة رأسمال والخدمة التكاملية في باب واحد بمحافظة رياو و مديرية إندراغيري هيلير منطقة رتيه. مصادر البيانات هي المقابلة مع المجتمع فولو كيجانج، مهتم الثقافة، ووجيه العادة.

مؤسسا على نتيجة البحث أنّ المجتمع البوغي في قرية فولو كيجانج يعتبر أنّ نقود *Pa'baji* و نقود *Panai* هو ثقافة لإعطاء النقود التي واجب على الزوج إعطائه إلى الزوجة لوظيفة استخدامه مصروف إقامة وليمة العرش. هدفه تكريما على أسرة الزوجة. *Pa'baji* في الزواج عند ثقافة البوغي هو أحد من شروط، لأن عدم *Pa'baji* فعدم الزواج. إسلام لا يكون عن نقود *Pa'baji* أو نقود *Panai* ولكن حكم مباح إذا لا إيجاب فيه. إسلام لا ينهي عن إعطاء نقود *Pa'baji* في الزواج عند ثقافة البوغي لأن لا دليل يبين عن ذلك. المهّم إعطاء *Pa'baji* لا يخلف الشريعة. في *Pa'baji* ليس في الإيجاب مناسب بقلّة الزوج.

الكلمة الرئيسية: *Pa'baji*، الزواج، المجتمع البوغي، فولو كيجانج، مقاصد الشريعة.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Dalam konteks inilah Ulama Fiqih mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyariatkannya perkawinan tertentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.¹ Terwujudnya sebuah keluarga diawali dengan adanya suatu resepsi yang disebut dengan perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al- Tasyri' wa Falsafatuhi, (Beirut : Dar al-Fikri, 1974), hlm. 102. Abbas al- Mahmud al-Aqqad, al-mar'ah fi al-Qur'an. (Kairo : Nahdhah Misr, 2003,hlm.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum: 21)

Tujuan pernikahan dalam Islam sebagaimana dikemukakan di atas, juga terungkap dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1, bahwa perkawinan didefinisikan sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau akad nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya calon suami dan calon istri,
2. Wanita yang halal dinikahi
3. *Sighat* (*ijab* dan *qabul* bersifat selamanya)
4. Adanya dua orang saksi
5. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu,
6. Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas, dan

² Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang , Jakarta, 1975, Cet. Ke-1, hlm. 79. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa Pernikahan adalah :” Akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2001), hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Adanya Wali.³

Perkawian mempunyai cita-cita luhur yang hendak dicapai, berdasarkan definisi perkawinan itu sendiri yang menekankan terwujudnya tujuan. Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah: “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pada umumnya langkah awal dari perkawinan tersebut adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu menyampaikan kehendak atau melamar jodoh yang telah didapatkan itu.

Adapun suatu pertunangan yang telah terjadi mengakibatkan satu pihak terikat perjanjian dengan pihak lain. Akibat hukum lain yang timbul disebabkan pertunangan tersebut adalah keharusan memberikan hadiah-hadiah yang mana berbeda-beda menurut adat setempat. Bilamana tidak ada pemberian hadiah maka pertunangan dibatalkan.⁵ Begitupun yang terjadi dalam perkawinan adat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

Perkawinan adat dalam suku Bugis Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh disebut *pa''bottingeng*. *Pa''bottingeng* merupakan ritual

³ Anshari Thasyib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya : PT. Risalah Gusti, 1994), Cet Ke- 3. Hlm. 25

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. (Bandung:Pustaka Setia,2001),hlm.15

⁵ Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), 167.

yang sangat sakral dimana ritual tersebut harus dijalani oleh semua orang. Seorang gadis yang telah menginjak usia dewasa seharusnya sudah menikah. Jika tidak demikian maka akan menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat luas, sehingga terkadang orang tua mendesak si gadis untuk menikah dengan calon suami pilihan mereka.

Sebelum prosesi *pa''bungtingeng* dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah *assuro*. *Assuro* adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, sekaligus penentuan pemberian *uang pa'baji*⁶ yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita apabila lamaran tersebut diterima.⁷

Masyarakat suku Bugis dan khususnya di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Pulau Reteh menganggap bahwa pemberian *pa'baji* atau *uang panaik* dalam perkawinan adat Bugis adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada *pa'baji* atau *uang panaik* berarti tidak ada perkawinan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kelurahan Reteh sejak lama dan turun menurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang.

Perbedaan adat masyarakat suku Bugis tersebut, pada hakikatnya dalam hukum perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan

⁶ Sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.

⁷ Karman, *Wawancara*, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, 28 Maret 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun tarif *pa'baji* atau *uang panaik* yang harus ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki. Adapun kewajiban yang ada dalam perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri. Mahar tersebut termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Dengan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diajukan. Apabila pihak mempelai wanita sepakat dengan mahar yang ditawarkan oleh pihak mempelai pria, bentuk dan jenisnya dapat ditetapkan oleh kedua belah pihak.⁸

Adapun adat istiadat perkawinan masyarakat bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragili Hilir ini agak berbedah dengan atauran syariah Islam dengan adat istiadat perkawinan Bugis. Karena dalam adat perkawinan bugis yang di utamakan adalah *pa'baji* dengan faktor pendidikan misalnya, jika wanita yang akan dilamar memiliki pendidikan sebagai sarjana strata 1, harga *pa'baji* atau *uang panai* akan lebih mahal dari wanita yang lulusan SMA, sedangkan wanita lulusan S2 akan jauh lebih mahal dari wanita lulusan S1.

Entitas al-fiqih al-munakahat sebagai acuan hukum perkawinan dalam Islam bersifat mapan dan sangat komperhehsif, menjangkup tiap

⁸ Ibid.

ketentuan dalam wilayahnya. Namun pada perjalanannya, undang-undang ini sedikit terusik dengan adanya peraturan (hukum) lain yang tidak tercantum secara sorih dalam sumber-sumber hukum Islam, baik dalam nass Al-Qur'an, as-Sunnah maupun ijma', juga belum pernah dirumuskan oleh para fuqaha' melalui ijtihad. Dalam permasalahan ini yaitu setandar *pa'baji* dalam hukum perkawinan masyarakat Bugis di daerah Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reth Kabupaten Indragili Hilir.

Sejalan dengan keunikan aspek penetapannya, praktek *pa'baji* dalam perkawinan adat Bugis sebagai suatu produk budaya tidak lepas dari pengaruh perkembangan zaman. Munculnya generasi baru, dengan pemahaman baru yang lebih kontekstual memberikan khazanah pembaharuan pada tataran konsep *pa'baji* atau uang panai/uang jujur adat Bugis. Sehingga melahirkan suatu dinamika antara golongan adat yang cenderung konservatif dengan generasi baru (tokoh agama, tokoh pendidikan) yang cenderung reformis. Oleh karena adanya perbedaan tersebut penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang status *pa'baji* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir.

Standar *pa'baji* dalam hukum perkawinan masyarakat Bugis di Pulau Kijang semacam ini tidak lahir dari ruang hampa atau tanpa adanya sebab yang melatar belakanginya, namun ia lahir berdasarkan catatan sejarah hingga menjadi hukum adat yang mengakar dan mengikat seperti sekarang. Adat masyarakat Bugis seperti ini, menimbulkan rasa bangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tarif *pa'baji* yang tinggi kepada masyarakat sekitarnya sehingga lambat laun masyarakat Bugis khususnya kaum laki-laki enggan meminang wanita Bugis di Kelurahan Pulau Kijang kecamatan Reteh yang akan menyebabkan terzalimi salah satu pihak. Dengan demikian tidak akan tercapailah tujuan syariat yang agung (*maqasyhid al-syari'ah*) Allah Swt di atas bumi, yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: *menggapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan.*⁹

Mayoritas masyarakat suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir beragama Islam, namun dalam masalah penerapan hukum perkawinan masih sering terjadi tarik-ulur antara hukum Islam dan hukum adat tersebut keduanya mempunyai posisi dan pengaruh yang sama kuatnya dalam masyarakat.

Standar *pa'baji* dalam hukum perkawinan masyarakat Bugis di Pulau Kijang” adalah fenomena yang menarik untuk dikaji, karena selain adat yang mengakar cukup kuat dan belum ada kepastian hukumnya dalam Islam, *pa'baji* (jujukan) minimal Rp.50.000.000 diluar dari perlengkapan yang lainnya seperti: isi kamar kosong, beras, gula, gandum dan kebun sebagai *sompa* (mahar). Ini selalu menjadi permasalahan yang kontroversial pada masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir belum menemukan titik

⁹ Muhammad Thâhir Ibn ‘Asyûr, *Maqâshidu al-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Kairo : Dar al-Salam, 2006), hlm. 62



kejelasan. Keadaan seperti ini melahirkan permintaan dari berbagai pihak kepada peneliti untuk mengadakan sebuah riset guna mencari bagaimana status hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Fakta tersebut menjadi motivasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti, untuk mengadakan penelitian mengenai gejala-gejala sosial dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya setandar *pa'baji* atau uang jujur lamaran yang tinggi pada masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabu Inragiri Hilir.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti ini lebih terarah jelas dan fokus, maka penulis memberikan batasan masalah pada tesis ini pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi standar *pa'baji* pada masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir ditinjau dari hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pelaksana standar *pa'baji* masyarakat bugis di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inragiri Hilir ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir tentang standar *pa ' baji* bugis?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa hukum maqosyid tentang sepadan *pa'baji* dalam hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksana standar *pa' baji* pada masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir
3. Untuk mengetahui hukum maqosyid tentang pada *pa'baji* di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir.

E. Manfaat Penelitian

Dalam metode penilitian, merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan suatu faktor yang penting akan digunakan untuk mencapai dan mendapatkan data secara lebih tepat dalam penelitian ini, maka penulis penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum Islam, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya terhadap setandar *pa'baji* dalam hukum perkawinan masyarakat Bugis di Pulau Kijang

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya hukum perdata Islam mengenai setandar *pa'baji* atau jujuran lamaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹⁰ Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

فِي تُقْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَاكِحُوا الْيَتَامَىٰ وَرُبَاعَ وَثَلَاثَ مَثْنَىٰ النِّسَاءِ مِنْ خِفْتُمْ فَإِنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا أَنْتَعُولُوا ۖ

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil¹¹, Maka (kawinilah) seorang saja¹², atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S.An-Nisa : 3)

Anwar Harjono (1987:220) mengatakan bahwa pengertian ialah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam penertian yang sama dengan nikah atau zawajdalam istilah fiqh. Para fuqoha dan mazhab

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Buku 1), Bandung: Pustaka Setia, 2001. Hlm : 9

¹¹ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

¹² Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu perjanjian atau melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح . sinonimnya تزوج diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata nikah telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karna itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai ucapan pernikahan. Disamping itu, kata pernikahan tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata perkawinan. Kata perkawinan lebih cocok untuk makhluk selain manusia.¹³

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

a. Menurut Hanabilah: nikah adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹⁴

b. Menurut Sajuti Thalib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki

¹³ Ibid: 10

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, 1986. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi. hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁷ Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo., *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara 1996. hlm. 2

¹⁶ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres., hlm. 86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Dasar Hukum Pernikahan.

Ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang perintah yang terkait dengan pernikahan terhadap umatnya dengan menetapkan syarat-syarat dalam menegakkan konsep pernikahan Islam. Sesuai didalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat: 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja¹⁸, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S.An-Nisa : 3)

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Bahkan diberikan penetapan tentang batasan wanita yang boleh untuk dinikahi. Syarat Adil dalam ayat ini adalah adil didalam kewajiban memberikan nafkah kepada isteri berupa pakaian, tempat tinggal, giliran dan lainnya yang bersifat lahiriyah.

¹⁸ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artiya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dari ayat di atas hendaklah seorang laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)²¹

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu

¹⁹ Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat: 72

²⁰ Al-Qur'an Surat An-Nur ayat: 32

²¹ Shohih Muslim, Juz 2, (Maktabah Syamiilah), hlm. 1019

hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (HR. Muslim).

Seruan dari Rasulullah ditujukan kepada para pemuda karena sesungguhnya mereka memiliki kekuatan kecintaan kepada kaum wanita. Ulama berbeda pendapat tentang maksud “*ba'ah*”, pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud adalah jima’. Maka dapat diartikan bahwa barang siapa diantara kamu yang mampu untuk jima’ disamping mampu biaya dalam pernikahan, maka hendaklah dia nikah, dan barang siapa belum mampu jima’ disamping tidak mampu membiayai dalam pernikahan maka hendaklah ia berpuasa agar dia dapat mengendalikan syahwatnya dari kejahatan nafsu birahinya.²²

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah *jaiz* (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau

²²Abu Bakar Muhammad, Terjemah, *Subulus Salam*, Cet 1, (Surabaya: Al-Ikhlas), hlm. 393.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.

- d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

3. Asas-Asas Pernikahan

Menurut Sayuti Thalib, asas pernikahan dalam hukum Islam adalah monogami, ketentuan ini berdasarkan firman Allah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²³

Menurutnya poligami yaitu pernikahan seorang suami (laki-laki) dengan lebih seorang isteri.²⁴ kebalikan dari poligami adalah adalah poliandri yaitu seorang wanita (isteri) mempunyai lebih dari seorang laki-

²³ Al-Qur'an An-nisa: 3

²⁴ Sayuti Thalib, *Azas Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.

laki (suami). Pernikahan ini dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana firman Allah.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang laki-laki yang akan perpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami terhadap wanita yang sedang bersuami.²⁶

Asas-asas pernikahan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yaitu:

- a. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas ini sesuai dengan firman Allah

²⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat: 24

²⁶ Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hlm. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:.. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁷

- b. Suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.
- c. Suatu pernikahan harus dicatat.
- d. Asas monogami

Monogami dalam hukum pernikahan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3, yang pada dasarnya bahwa dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.²⁸

Meskipun menganut asas monogami, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4, membuka kemungkinan peluang bagi seorang suami untuk berpoligami. dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan yang disebutkan pada ayat 2:²⁹

²⁷ Al-Qur'an Ar-rum: 21

²⁸ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementetrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.22

²⁹ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 5 ditambahkan mengenai pengajuan permohonan ke pengadilan, yakni pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.³¹
- d. Cukup umur
- e. Mempersulit terjadinya perceraian
- g. Kewajiban suami istri adalah seimbang.³²

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

³⁰ Ibid, hlm.23

³¹ Ibid, hlm. 23

³² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.30-32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِيهِنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.³⁴

B. Rukun, syarat, dan sah pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.³⁵

³³ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat: 32

³⁴ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat: 32

³⁵ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010)Hal.45-46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁶

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- 1.) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2.) Adanya wali dari pihak wanita
- 3.) Adanya dua orang saksi
- 4.) Sighat akad nikah³⁷

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat :

a) Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (mas kawin)

³⁶ Gemala dewi SH, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005) Hal.49-50

³⁷ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) Hal.46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat aqad nikah³⁸

b) Imam syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam :

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah³⁹

b.) Menurut ulama khanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.

c.) Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat :

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat

karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun :

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
2. Adanya wali
3. Adanya dua orang saksi
4. Dilakukan dengan sighat tertentu⁴⁰

1. Pengertian dan Macam-macam Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang

karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama

³⁸ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. Op.cit. Hal.48

³⁹ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. Op.cit. Hal.48

⁴⁰ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) Ha.46-48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan yaitu dilihat dari kata *nasab*, bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan nikah.¹² Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- 1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu:
 - a) Ayah
 - b) Ayah dari ayah
 - c) Dan seterusnya ke atas
- 2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu:
 - a) Saudara kandung
 - b) Saudara seayah

⁴¹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 69)

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Anak dari saudara kandung

d) Anak dari saudara seayah

3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu:

a) Saudara kandung dari ayah

b) Saudara se bapak dari ayah

c) Anak saudara kandung dari ayah

C. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua :

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.⁴³

Secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

1) Syarat-syarat kedua mempelai

b. Calon mempelai laki-laki

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu :

1. Calon suami beragama Islam
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

⁴³ Ibid. Hal.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Orangnyanya diketahui dan tertentu
4. Calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri
5. Calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
6. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
7. Tidak sedang melakukan ihram
8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
9. Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)⁴⁴

c. Calon Mempelai Perempuan

Syarat bagi mempelai perempuan yaitu :

1. Beragama Islam
2. Terang bahwa ia wanita
3. Wanita itu tentu orangnya
4. Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
6. Tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
7. Tidak dalam ihram haji atau umrah⁴⁵

⁴⁴ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) Hal.50

⁴⁵ Ibid. Hal.55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.) Syarat-syarat ijab Kabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan.⁴⁶ Perkawinan wajib ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

a. Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi

Tidak semua perempuan boleh dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan menikahnya, baik haramnya untuk selamanya ataupun sementara.

Yang haram selamanya, yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa. Sedang yang haram sementara yaitu perempuannya tidak boleh dikawininya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bilamana keadaannya sudah berubah haram semmentaranya hilang dan menjadi batal.⁴⁷

b. Sebab-Sebab Diharamkan Selamanya

⁴⁶ Gemala dewi, SH, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005) Hal.63

⁴⁷ Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al-Ma'arif, 1990, hal. 93.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;⁴⁸ saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa : 23)

c. Karena Nasab

1) Ibu kandung (perempuan yang melahirkan kita), termasuk dalam pengertian ibu yakni ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan seterusnya ke atas, berdasarkan firman Allah :

⁴⁸ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya: *"diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu"* (QS. An-Nisa': 23)

- 2) Anak perempuan kandung (semua anak perempuan yang kau lahirkan), termasuk di dalamnya anak perempuan kandungmu, anak-anak perempuannya seperti cucu perempuan dan cicit (anak cucu) perempuan dan seterusnya ke bawah, berdasarkan firman Allah:

artinya: *"anak-anakmu yang perempuan"* (QS. An-Nisa': 23)

- 3) Saudara perempuan baik saudara kandung, saudara seapak ataupun saudara seibu, berdasarkan firman Allah:

artinya: *"saudara-saudaramu yang perempuan"* (QS. An-Nisa': 23)

- 4) Saudara perempuan bapak (bibi dari bapak)⁴⁹, berdasarkan firman Allah:

artinya: *"saudara-saudara bapakmu yang perempuan"* (QS. An-Nisa': 23)

- 5) Saudara perempuan ibu (bibi dari ibu)⁵⁰, berdasarkan firman Allah:

artinya: *"saudara-saudara ibumu yang perempuan"* (QS. An-Nisa': 23)

- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), dan cucu perempuan saudara laki-laki, berdasarkan firman Allah:

⁴⁹ Termasuk di sini adalah bibinya bapak kita, bibinya kakek dan seterusnya ke atas.

⁵⁰ Termasuk di sini adalah bibinya ibu kita, bibinya nenek dan seterusnya ke atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya: *"anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki"* (QS. An-Nisa': 23)

7) Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), berdasarkan firman Allah:

artinya: *"anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan"* (QS. An-Nisa': 23)

d. Yang Haram Karena Pernikahan (*mushoharoh*)

1) Ibu istri (ibu mertua), neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah ke atas, dan tidak dipersyaratkan tahrim ini suami harus dukhul "*bercampur*" lebih dahulu. Meskipun hanya sekedar akad nikah dengan puterinya, maka sang ibu menjadi haram atau menantu tersebut. sebagaimana firman Allah :

".....dan ibu-ibu isteri kamu." (Q.S. An-Nisa : 23)

2) Anak tiri perempuan dari isteri yang sudah didukhul (digauli), oleh karena itu, manakala akad nikah dengan ibunya sudah dilaksanakan namun belum sempat (mengumpulinya), maka anak perempuan termasuk halal bagi mantan suami ibunya itu. Hal ini didasarkan pada firman Allah,

"Dan anak tiri perempuan kamu yang ada di tangan kamu dari istrimu yang telah kamu gauli. Jika kau belum menggauli dengan isteri kalian itu (dan sudah kalian campur), maka tidak berdosa kalian menikahinya." (An-Nisaa:23).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Isteri anak kandung, isteri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah :

“...Dan isteri-isteri anak kandung kamu.” (Q.S. An-Nisa : 23)

4) Ibu tiri diharamkan atas anak menikahi ibu tirinya. Sebagaimana firman Allah:

“Dan janganlah kamu nikah dengan ibu-ibu tiri kamu kecuali yang sudah terjadi dimasa lalu karena ia merupakan perbuatan yang kerji dan dibenci dan jalan yang paling buruk.” (Q.S. An-Nisa : 22)

Golongan Hanafi berpendapat, seseorang yang berzina dengan perempuan atau menyentuhnya atau menciumnya, atau melihat kemaluannya dengan bernaflu, maka haramlah baginya menikah dengan ibu perempuan tersebut atau dengan anak-anaknya. Begitu juga bagi perempuan tersebut haram nikah dengan bapak laki-laki tadi atau anak-anaknya. Sebab menurut mereka haram nikah karena perzinahan dikiaskan dengan haram nikah karena pernikahan, dan disamakan dengan hukum ini segala perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan bersetubuh (seperti : pegang atau cium) dan perbuatan-perbuatan yang mendorong untuk bersetubuh (seperti: melihat dan sebagainya).⁵¹

Tetapi menurut jumhur ulama berpendapat bahwa zina tidak dapat menyebabkan haram sebagaimana dengan haramnya karena

⁵¹ Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al-Ma'arif, 1990, hal. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan. Alasannya adalah firman sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah :*"Bahwa Nabi pernah ditanya tentang laki-laki yang telah berzina dengan perempuan, kemudian ia ingin menikahi perempuan tersebut atau anak perempuannya. Maka Rasulullah SAW bersabda;*

"Barang haram tidak mengharamkan yang halal, dan yang mengharamkan pernikahan itu hanyalah pernikahan."

e. Haram Karena Sebab Susuan

Demikian juga dilarang untuk menikah yang disebabkan adanya faktor susuan (QS. An-Nisa : 23). Mereka itu adalah

- 1) Ibu yang menyusui. Karena ia menjadi ibu bagi anak yang disusunya
- 2) Ibu dari ibu yang menyusui (nenek). Karena ia telah menjadi neneknya.
- 3) Ibu dari suami wanita yang menyusui. Karena ia juga menjadi neneknya
- 4) Saudara perempuan ibu yang menyusui. Karena ia menjadi bibi bagi yang disusui.
- 5) Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui. Karena ia juga menjadi bibi bagi yang disusui dari pihak bapak.
- 6) Cucu perempuan dari ibu yang menyusui. Karena ia juga menjadi bibi bagi yang disusui dari pihak bapak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Saudara perempuan dari ibu dan bapak. Yaitu baik berbarengan dengan anak yang disusunya maupun sebelum atau sesudahnya. Begitu pula dengan saudara dari bapak susuan, yaitu wanita yang diusui oleh istri bapak. Juga saudara perempuan dari ibu susuan yaitu wanita yang dsusui oleh ibu dengan air susu yang keluar dari suami lain.⁵²

f. Haram disebabkan saling melaknat

Diharamkan bagi seorang muslim menikahi wanita yang telah dilaknatnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“dua orang (laki-laki dan perempuan) yang saling melaknat, jika berpisah, tidak boleh disatukan kembali selamanya.” (H.R. Malik dan Abu Dawud)

Menurut Imam malik, dua orang (laki-laki dan perempuan) yang saling melaknat) tidak boleh menikah selamanya.⁵³

g. Sebab-Sebab Diharamkan Sementara

- a. Haram untuk mengumpulkan (menikahi dalam waktu bersamaan) antara 2 wanita bersaudara, berdasarkan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ

⁵²Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007, Hal. 392

⁵³ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan⁵⁴; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. an-Nisa’: 23).

Demikian juga haram mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَغَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

“Tidak dikumpulkan seorang wanita dengan bibi dari bapaknya dan tidak pula dengan bibi dari ibunya” (mutafaq ‘alaih)

Dan Rasulullah telah menjelaskan hikmah ketika beliau bersabda:

إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ

“Sesungguhnya apabila kalian melakukan hal ini, kalian telah memutus tali rahim kalian”

Yang demikian ini akan terjadi apabila di antara madu terjadi saling cemburu. Apabila di antara mereka dari kerabat dekat maka akan

⁵⁴ Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi pemutusan tali rahim. Apabila seorang wanita telah diceraikan dan habis iddah-nya, maka menjadi halal saudaranya atau bibinya karena telah hilangnya larangan.

Tidak boleh mengumpulkan (menikahi dalam waktu bersamaan) lebih dari 4 wanita, berdasarkan firman Allah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil⁵⁵, Maka (kawinilah) seorang saja⁵⁶, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa': 3).

Dan sungguh Nabi SAW telah memerintahkan orang yang mempunyai istri lebih dari 4 sebelum Islam untuk menceraikan istri-istri yang lebih dari 4 (empat). Tidak boleh menikahi wanita yang sedang dalam masa 'iddah (menunggu) karena pisah dengan suaminya yang pertama, berdasarkan firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ

⁵⁵ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

⁵⁶ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ⁵⁷ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu⁵⁷ dengan sindiran⁵⁸ atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf⁵⁹, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqoroh: 235).

Di antara hikmah hal ini adalah bisa jadi wanita tersebut hamil, sehingga akan tercampur air mani dan rancunya nasab anak.

Haram menikahi wanita yang berzina apabila diketahui zinanya sampai dia bertaubat dan habis 'iddahnya, berdasarkan firman Allah :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin⁶⁰ (QS. An-Nur:3).

⁵⁷ Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

⁵⁸ Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

⁵⁹ Perkataan sindiran yang baik.

⁶⁰ Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

Haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi istrinya yang telah dicerai tiga sehingga dia (mantan istri) telah digauli oleh suami baru dengan pernikahan yang benar, berdasarkan firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqoroh: 230)

Haram menikahi wanita yang sedang berihram (haji atau umroh) sampai dia halal dari ihromnya. Demikian juga tidak boleh bagi laki-laki yang sedang ihrom untuk melakukan akad nikah dengan seorang wanita sedangkan dia masih berihrom, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

"Orang yang ihrom tidak boleh menikah, dinikahi dan tidak boleh melamar" (HR. Jama'ah kecuali Bukhori)

Laki-laki mukmin tidak boleh menikahi wanita kafir, berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآ أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُ أَيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqoroh: 221)

Yakni halal bagi kalian. Ayat ini menjadi pengecualian (pengkhususan) dari keumuman dua ayat sebelumnya dalam pengharaman menikahi wanita-wanita kafir bagi laki-laki mu'min, dan para Ulama' telah berijma atas hal ini.

Haram bagi muslim merdeka untuk menikahi budak muslimah, karena yang demikian akan menghilangkan status budak pada anak-anaknya. Kecuali apabila khawatir dirinya akan terjerumus kepada zina dan belum mampu membayar mahar wanita merdeka atau harga budak wanita, maka boleh bagi dia ketika itu untuk menikahi budak muslimah, berdasarkan firman Allah:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَإِنْ كُفُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ
وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفِجْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرَ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain⁶¹, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa': 25)

Haram bagi tuan laki-laki untuk menikahi budak perempuannya, karena akad kepemilikan (atas budak) lebih kuat daripada akad nikah. Dan tidak bergabung suatu akad dengan akad yang lebih lemah darinya.

D. Pengertian Ta'aruf

Islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Seperti tersebut dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. telah memberikan petunjuk, bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan

⁶¹ Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman

bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

*Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat : 13)*⁶²

Akhir-akhir ini, proses khitbah (peminangan) biasanya diawali dengan adanya pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda-mudi yang pacaran, kalau ada kesesuaian lahir batin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Agaknya, pacaran di sini, dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, yang dalam ajaran Islam disebut dengan “ta’aruf” (saling kenal-mengenal).⁶³

⁶² .A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009) hlm. 22-23.

⁶³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 21

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. **Khitbah (meminang)**

Kata peminangan berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “khithbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁶⁴

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

Pinangan yang kemudian berlanjut dengan “pertunangan” yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamat, dll. Ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Pertunangan (khitbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh

⁶⁴Ibid, hlm. 24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.

Namun masa khitbah bukan lagi saat untuk memilih. Mengkhitbah sudah jadi komitmen untuk meneruskannya ke jenjang pernikahan. Jadi shalat istiharah sebaiknya dilakukan sebelum khitbah. Khitbah dilaksanakan saat keyakinan sudah bulat, masing-masing keluarga juga sudah saling mengenal dan dekat, sehingga peluang untuk dibatalkan akan sangat kecil, kecuali ada takdir Allah yang menghendaki lain.

Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut: ⁶⁵

1. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, "saya berkeinginan untuk menikahimu."
2. Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, "tidak ada orang yang tidak sepertimu."
3. Perempuan yang Boleh Dipinang dan Batasan Melihat Perempuan yang Dipinang

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut: ⁶⁶

1. Tidak dalam pinangan orang lain;

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, hlm.6492

⁶⁶ Op.cit., hlm. 24-25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang dilangsungkannya pernikahan;
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i; dan
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan).

Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman. Hukum tersebut berdasarkan sabda Nabi saw. :

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدري (رواه احمد و مسلم)

Artinya: "Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya". (H.R. Ahmad dan Muslim)⁶⁷

Meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi, kalau pinangan semua ditolak dengan terang-terangan atau sindiran, atau karena laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.⁶⁸

⁶⁷ Ibid, hlm. 27

⁶⁸ Ibid, hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meminang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian suaminya, karena talak raj'i maupun talak ba'in, maka hukumnya haram. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak raj'i, ia haram dipinang karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya, dan suaminya itu masih berhak meruju'nya kembali sewaktu-waktu ia suka.⁶⁹

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi saw.:

عن المغيرة ابن شعبه انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت اليها؟ قال: لا، قل: انظر اليها فانه ان يؤدم بينكما. (رواه النسائي وابن ماجه والترمذی)

Artinya: "Dari Mughirah bin Syu'bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah saw. Bertanya kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng". (H.R. Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)⁷⁰

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Al-Dzahiri) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka, dan dua telapak tangan.⁷¹

⁶⁹ Ibid, hlm. 30

⁷⁰ Ibid, hlm. 25

⁷¹ Ibid

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَخَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur:31)⁷²

⁷² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum Peminan dan Hikmahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadits Nabi memang banyak yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujahtid yang menukilkan pendapat Daud al-Dzahiri yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.⁷³

Adapun hikmah dari adanya syari'at peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan setelah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari hadits Nabi dari Al-Mughirah bin al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan al-Tirmidzi dan al-Nasa'i yang berbunyi sebagai berikut:

أنه قال له وقد خطب امرأة انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما

Artinya: *Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan: "melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan". (al-Shan'aniy III, 113)⁷⁴*

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 50

⁷⁴ Ibid



E. Pentingnya Keluarga

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁷⁵

Keluarga merupakan tempat fitar yang sesuai dengan keinginan Allah SWT. bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifa, Allah AWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya; Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).⁷⁶ (QS. Ar-Ra'd : 38)

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasanya taialah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.⁷⁷ Telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada

⁷⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga cetakan kedua*, (Jakarta, Remaja Rosdakarya : 2012).Hlm: 23

⁷⁶ Tujuan ayat ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian. keduanya untuk membantah Pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan Keadaan masanya.

⁷⁷ Ibid:23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga.

Hal itu adalah fitrah kehidupan dan, manusia mengharapkan kemuliaannya⁷⁸ Sebagai mana yang ada dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui⁷⁹ (Q.S.Ar-Rum Ayat:30)

Tujuan perkawinan akan terkait pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan. Dengan demikian maka timbul pertanyaan bagaimana keluarga bahagia itu, Walalupun kebahagiaan itu relatif dan subyektif, tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *welfare*.⁸⁰

Keluarga merupakan keluarga bahagia bila dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran,

⁷⁸ Dr.Mushthafa Abdul Wahid, *Al-Usrah fi Al-Islam*, hlm.13

⁷⁹ *Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.*

⁸⁰ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), hlm:15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga keluarga itu berjalan dengan baik tanpa guncangan-guncangan atau pertengkaran-pertengkaran yang berarti (*free from quarelling*).⁸¹

Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁸² Hal ini senada dengan firman Allah: Q.s. ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S.Ar-Rum Ayat: 21)

Adapaun tujuan perkawinan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tujuan umum yang hendak dicapai adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁸¹ Ibid. hlm. 16

⁸² Lihat buku Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1, cet.1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12-18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. melaksanakan libido seksual
2. memperoleh keturunan
3. memperoleh keturunan yang shaleh
4. memperoleh kebahagiaan dan ketentaraman
5. mengikuti sunnah Nabi;
6. menjalankan perintah Allah; dan
7. untuk berdakwah.⁸³

F. Pengertian Maqshid al-Syari'ah

Secara bahasa, Maqshid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan.⁸⁴ Syari'ah berasal dari "asyar'ah al-syai" dan al-syari'ah" dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang kesana tidak memerlukan adanya alat.⁸⁵ Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁸⁶

Jika diteliti arti syari'ah secara bahasa di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat keterkaitan makna antara syari'ah dengan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Suatu yang hendak dituju tentu merupakan suatu yang penting. Syari'ah merupakan cara atau jalan, sedangkan air adalah suatu yang hendak dituju. Pengaitan syariah dengan

⁸³ *Loc. It.*

⁸⁴ Fathrrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam I*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 124

⁸⁵ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (kairo: Dar-al ma'arif, 1119), hlm. 3642

⁸⁶ Lihat tema "Syara'a dalam "Mu'jam al-fazh al-Qur'an al-karim, juz 2, (Kairo' Al-lighah) hlm 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air dalam penertiang bahasa ini, dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syariat dalam memperoleh sesuatu yang penting.⁸⁷

Adapun makna syariat menurut istilah adalah Segala titah Allah yang berhubungan dengan tingka laku manusia di luar yang mengenai akhalak. Dengan demikian syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah⁸⁸. Menurut Muhamud Syaltut seperti dikutip oleh Moh Dahlan, syari'ah aalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang ditujukan bagi segenap Hmba-Nya untuk diikuti⁸⁹

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, bahwa kata syariat tersebut mengandung dua arti yaitu:

- a) Seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, akhalak, hukum dan mu'amalah. Dengan kata lain syari'at mencakup *usul* dan *furu'*, akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah (Tuhan, Nabi dan *sam'iyat*). Sebagaimana iapun mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah⁹⁰

⁸⁷ Fazlurrahman, *Islam, ahli bahasa Ahsin Muhammad* (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 140

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Usul fiqih, jilid I*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm.2

⁸⁹ Moh Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na'im; *Epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 84

⁹⁰ Muamalah adalah hubungan kepentingan antara sesama manusia, dalam Al-Qur'an disebut habl min an-nas. Muamala meliputi tansaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan perseketaan (gugatan, perdilan dan sebagainya) dan menyangkut pembagian warisan. Abdul Aziz Dahlan (ed; *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6....., hlm, 356

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akhlak serta dirangkum dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama aqidah, fiqh dan akhlak.

- b) Sisi hukum alam didalam Agama. Seperti ibadah dan mu'amalah yang mencakup hubungan sesama dan ibadah kepada Allah. Serta mencakup yang urusan keluarga (al-akhwal al-syakhsiyah), masyarakat, umat, negara, hukum dan hubungan luar negeri.⁹¹

Asfri jaya Bakri⁹² menjelaskan bahwa pada periode- periode awal, syari'ah merupakan al-nusus al-maqashid dari al-Qur'an dan sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syari'ah dan pengertian ini mencakup aqidah, maliyah dan khulukiyah. Seperti firman Allah dalam surat al-Jatsiyah ayat 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Namun kemudian, penggunaannya dikhususkan kepada hukum-hukum syari'ah. Penghususan ini dilakukan karena Agama (*samawi*) pada prinsipnya adalah satu, berlaku secara universal dan ajaran aqidahnya pun tidak berbeda dari satu rasul yang satu dengan yang lainnya, yaitu tauhid,

⁹¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi al-maqashid al-syari'ah*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 16-17.

⁹² Asfri jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah; Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan syari'at hanya berlaku untuk masing-masing umat sebelumnya. Dengan demikian syariah lebih khusus dari agama.⁹³

Syari'ah sebagai produk pemahaman manusia terhadap sumber-sumber ajaran Islam dalam konteks sejarah yang terus berkembang. Maka, dalam hal ini pemahaman syari'ah itu absolute. Syariah diformulasikan dan dirformasikan dengan tujuan agar Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu.

Oleh karena itu perludibedakan antara syari'ah pada level normative dan syari'ah yang bersifat historis. Syari'ah yang bersifat normative adalah aturang keagamaan yang bersifat baku, seperti sholat, puasa, zakat, iman kepada Allah, Nabi dan hari akhir. Jika yang pertama merupakan ketentuan yang baku, maka untuk yang kedua membutuhkan ijtihad dengan mendaya gunakan kreatifitas akal, perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman.

Syariat sebagai hukum positif mengatur kehidupan bangsa dan bernegara. Syari'at dalam penegrtian ini menyangkut penegakan hukum dan keadilan dalam suatu Negara. Syari'at Islam dalam konteks hukum modern adalah menurut pengertian yang terakhir ini, menyangkut undang-undang, konstitusi, hukum pidana, perdata dan lain-lain yang menjamin ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa syariah memiliki tiga makna;

⁹³ Alaidin Koto, Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), cet. Ke-3, halm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a). Syari'ah adalah seluruh ajaran Islam, meliputi akidah, ibadah, akhlak dan lainnya.
- (b). Bermakna hukum Islam dalam konteks ini semakna dengan fiqih. Kedua makna ini digunakan dalam kajian *maqashid al-syariah*.
- (c). Bermakna hukum Islam yang diformulasikan dalam undang-undang, konstusi, hukum dan sebagainya. Maka penertian yang ketiga ini tidak digunakan dalam *maqashid al-ayari'ah*.

Sedangkan makna *maqashid al-syari'ah* menurut istilah, ada beberapa pengertian dikemukakan ulama, diantaranya, menurut al-Syatibi.⁹⁴

Menurut Yusuf al-Qaradhawa *maqashid* adalah:” Tujun yang menjadi targe teks dan huku-hukum pertikur umtuk diarelisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.⁹⁵

Menurut Satria Efendi, *maqashid al-Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah' sebagai alasan logisi bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁹⁶

⁹⁴ Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Latar belakang nasab dan kehidupan keluarganya serta tahun kelahirannya belum banyak diketahui. Ia wafat tahun 790 H, karya gemilangnya adalah kitab *al-muwafaqat* dan *al-I'tisham*. Lihat. Abi al-Fadhil 'Abd al-Salam ibn Muhammad ibn 'Abd al-Karim, *al-Imam al-Syatiby wa Manhaj al-Tajdidy fi Ushul al-Fiqih*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, 2001. Hlm. 7

⁹⁵ Yusuf al-Qaradhawa *Fiqih Maqashid Syaria'ah*, terj Arif Munandar. (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm. 17

⁹⁶ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqih...*, hlm.233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqashid al-asyariah menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah tujuan umum Syari' dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dharuri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyyat*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyyat*).⁹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa *maqashid al-Syari'ah* ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemudaratatan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*), baik secara individual maupun kolektif. Kemaslahatan tersebut dapat berubah kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi.

Penarapan syariat Islam pada era modern menurut kepada pemahaman syariat, bukan hanya pada tataran simbilik saja. Tetapi harus digali kepada tingkat pengertian filosofis dan tujuan syariat itu diturunkan oleh Allah. Perbedaan waktu dan tempat meniscayakan perbedaan *masalih* dan *mafsadat* hamba Tuhan.

Untuk bisa mengakomodir semua permasalahan ini dituntut adanya *ijtihad* untuk menyikapi masalah kehidupan modern saat ini. Maka, untuk dapat mencapai sasaran Syari' maka sangat diperlukan *ijtihad* yang dituntun oleh *maqasid al-syari'ah*.

G. Tokoh Kajian Maqashid Al-Syari'ah.

Penerapan pendekatan hukum melalui *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal ini tersirat

⁹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, terj. Muh. Zuhri, (Semarang: Toha Putra, 1994), hlm. 310

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari beberapa ketentuan Nabi S.A.W. Seperti, antara lain, pada peristiwa Nabi SAW.pernah melarang kaim muslim menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar untuk tiga hari. Akan tetapi beberapa tahun kemudian peraturan yang dibuat oleh Nabi SAW. tersebut dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan tersebut disampaikan kepada Nabi SAW. beliau membenarkan perbuatan sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madina)⁹⁸

Dari kasus tersebut terlihat, adanya larangan menyimpan daging kurban diharapkan tujuan syari'ah dapat dicapai, yakni melapangkan kaum miskin yang datang dari dusun-dusun di painggiran Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itupun dihapuskan oleh Nabi saw.

Selanjutnya, kajian tentang maqashid al-syari'ah mendapat tempat dalam ushul fiqih, yang dikembangkan oleh para *ushuli* dalam penerapan *qiyas*, ketika berbicara tentang *masalik al-illah*. Kajian tersebut terlihat dalam beberapa karya ushul fiqih, seperti *al-Risalah* oleh Syafi'y, *al-mustasfha* karya al-gazali, *al- mu'tamad* karya Abu Hasan al-Bashri, dan lain-lain.⁹⁹

⁹⁸ Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos, 1999), hlm.41

⁹⁹ Ibid., hal. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembicaraan tentang *maqashid al-syari'ah* dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Syatibi (w 790 h) dalam karya *al-muwafaqat fi ushul al- Syari'ah*. Menurutnya, semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangkag merelisasikan kemeslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah dalam pandangan Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma yuthaq* (pembebanan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan).¹⁰⁰

Sepeninggalan Syatibi, kajian tentang *maqashid al- syari'ah* sempat redup, dalam arti tidak ada sarjana Islam yang secara khusus mendedikasikan diri dalam bidang ini. Kemudian, pada akhir abad ke 20, wawasan mengenai *maqashid al-syari'ah* kembali dikulirkan oleh ulama asal Tunisia Muhammad Thahir Ibn Asyur (w. 1393 H/1973 M). Karya Ibn Asyur tentang *maqashid al-syari'ah* berjudul *maqashid syari'ah al-Islamiyah*. Ibn Asyur dipandang sebagai bapak *maqashid* kontemporer setelah Syatibi. Karena Ibn Asyur berupaya untuk menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai ilmu baru yang terlepas dari *ushul fiqih*.¹⁰¹

Demikianlah tokoh-tokoh yang memberikan perhatian terhadap pentingnya *maqashid*. Namun begitu, mereka belum menawarkan konsep yang komprehensif seperti yang ditawarkan oleh Syatibi. Karna hal itu, maka Syatibi disebut sebagai bapak *maqashid syari'ah* atau dalam istilah

¹⁰⁰ Ibid., hlm. 43; Asafri Jaya Bakri, *Maqashid al-syari'ah*...., hlm. 65

¹⁰¹ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid al-syari'ah al-Islamiyah*, (Dar-Al-Fajr, 1999). hlm. 180



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain disebutkan bahwa Syatibi adalah *founding father maqashid al-syari'ah*, sama halnya dengan penyebutan Syafi'i sebagai bapak ushul fiqh.

1. Pembagian Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid Al-Syari'ah, yang secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut al-Syatibi, dapat dilihat dari dua sudut pandang.

Pertama, *maqashid al-Syari'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).¹⁰²

Dari sudut tujuan Tuhan, *maqashid al-syari'ah* mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari al-Syari' menetapkan syari'at yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Penetapan syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Penetapan syari'at sebagai hukum *taklif* yang harus dilaksanakan.
- d. Penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum.¹⁰³

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan akibat *maqashid*. Aspek yang kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandung. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan

¹⁰² Abu Ishak al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt). Hlm. 321

¹⁰³ Ibid. ham. 321-324

manusia untuk melaksanannya. Aspek yang terkahir berkaitan dengan kebutuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terdahap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu syariat bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syariat sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian dan melaksanakan syariat, manusia akan dilindungi didalam hidupnya dari segala kekacauan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu.

Dalam rangka pembagian maqashid al-syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakekat memberlakukan syari'at oleh Allah ayitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Tujuan-tujuan hukum Islam itu sebagai dengan fitrah manusia¹⁰⁴ dan fungsi-fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya. Secara singkat fungsi-fungsi untuk mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar ukum islam dengan istilah *al-tahsil wa dar al-ibqa'*. Oleh karena itu tujuan hukum islam pun adalah

¹⁰⁴ Fitrah manusia memiliki tiga daya atau potensi, yaitu 'aql, syahwah dan gadhab. Daya akal berfungsi untuk mengetahui Allah dan meng-Esak-Nya, daya syahwat berfungsi untuk menginduksi objek-objek yang menyenangkan dan memberi manfaat bagi manusia. Daya gadhab berfungsi untuk mempertahankan diri dan memelihara kelanggengan hidup yang menyenangkan, lihat. Juhaja S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UIN Bandung, 1995), hlm. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



al-tahsil wa dar al-ibqa' atau mengambil maslahat seta sekaligus mencegah kerusakan yang bisa disebut *jalb al-maslahalih wa dar al-mafasid*.

Seorang *mukaliaf* akan memperoleh kemaslahatan jika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan mafsadah jika ia tidak dapat memelihara kelima unsur itu dengan baik.

Selanjutnya, ada ulama yang menambahkan beberapa poin selain yang lima tersebut, misalnya Ibnu Asyur menambahkan *maqashid muru'ah al-fitrah*, *maqashid musawwah*, dan *hurriyah*¹⁰⁵ disamping *maqashid al-kuliah al-khamasah* yang telah ditetapkan Syatibi. Abid Jabiri mengurulkan banyak poin untuk dimasukkan dalam *maqasid* misalnya: hak menyatakan pendapat, kebebasan berpolitik, hak memilih pemimpin, kebebasan berpolitik, hak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Prof. Ahmad Djazuli¹⁰⁶ menambahkan dengan *hifzh al-ummah*. *Hifzh al-ummah* menjadi landasan filosofi dari *fiqh siyasah*.

Syatibi menjelaskan usaha untuk merealisasikan lima unsur pokok tersebut dibagi kepada tiga tingkat *maqashid*, yaitu: *Maqashid al-Darurivah*, *Maqashid al-Hijiyah* dan *Maqashid al-Tahsiniyah*.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Jasir 'Audah, *Multaqa al- Imam al- Qardhawi ma'a al-Ashabi, al-Talamiz, Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Syaikh al- Qardawi*, (Funduq al-Ridaz Kalrton, 2007), hlm. 71

¹⁰⁶ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-4, hlm.260

¹⁰⁷ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat....*, hal . 321

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya.

Adapun yang dimaksud dengan memelihara aspek al-Daruriyat adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Aspek ini keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, yang berhubungan dengan kebutuhan manusia itu sendiri baik di dunia maupun kebutuhan di akhirat. Jika luput dalam kehidupan manusia akan mengakibatkan rusak tatanan kehidupan manusia tersebut dan menimbulkan bencana besar.¹⁰⁸ *Daruriyat* diwujudkan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara itu, di sisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.¹⁰⁹

Kemaslahatan tersebut menurut Syatibi dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu *hifz al-dhin* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh an-nas* (memelihara keturunan), *hifzh al-'aql* (memelihara akal) dan *hifzh al-mal* (memelihara harta).¹¹⁰ kemaslahatan ini disebut juga dengan *al-masalih al-khamsah. /al-kulliyat al-khams*.

¹⁰⁸ Alaidin Koto, Ilmu Fiqih..., hlm.122, al-Syatibi, ibid, hlm. 324

¹⁰⁹ Wael B Hallaq, *Sejarah Tiori Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 248

¹¹⁰ Wael B Hallaq, ibid, Tetap ada ulama yang mengurykannya dengan *hifzh al-dhin* , *hifzh al-nafs* , *hifzh an-nas*, *hifzh al-'aql* dan *hifzh al-mal* , lihat Ali Jum'ah Muhammad, al-Madkhal, (Kairo: al-Ma'had 'Aly Lilfikir al-Islamy, 1996), hlm. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Memelihara Agama (*hifz al-dhin*),

Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka serta hubungan sesama manusia. Memeluk suatu agama adalah fitrah manusia, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berhubungan dengan 'aqidah, maupun mu'amalah.¹¹¹

Dalam bidang ibadah, Islam telah mensyariatkan beriman, serta diwajibkan bagi seseorang untuk melaksanakan sholat lima waktu, jika sholat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi agama, melaksanakan puasa, menunaikan zakat dan haji. Maka dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama. Untuk menjaga kelanggengan agama, Islam mensyariatkan hukum-hukum dihad terhadap orang-orang yang menghalangi dakwa Islam, serta memberikan hukuman bagi orang yang murtad¹¹² dari agama Islam.¹¹³

2) Memelihara Agama (*hifz al-dhin*),

Yakni terpeliharanya keselamatan jiwa, anggota badan serta kehormatan manusia, hak pertama dan utama yang dipeliharakan islam adalah hak hidup, maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam

¹¹¹ Nasrun Harun, Ushul Fiqih I..., hlm. 115 Abdul Wahab Khilaf, *Ilmu Ushul Fiqih*..., hlm. 313

¹¹² Ulama mendefinisikan riddah (murtad) adalah kafornya seorang muslim dengan sebab ucapan atau perbuatan yang menjadikan keluar dari agama islam. Hukum bagi orang yang murtad adalah hukum bunuh ketika di dunia dan kekal di neraka (ketika di akherat). Lihat *Amad Jazuli, Fiqih Siyasah*..., 144

¹¹³ Al-Syatibi, al- Muwafaqat..., hlm. 325; Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih*..., hlm. 122; Wahab Khalalaf. Hlm 314

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'at islam sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan serta tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran. i memelihara eksistensi kehidupan umat manusia dan sekaligus melindungi keberadaan komunitas muslim secara keseluruhan. Untuk mewujudkan itu Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa seperti membunuh juga membunuh diri sendiri,¹¹⁴ serta mewajibkan hukum *qishas* bagi pelaku pembunuhan.¹¹⁵ Firman Allah tentang mewajibkan *qishas* adalah berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya:.. Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹¹⁶

3) Memelihara keturunan(*hifzh an-nas*),

Yakin terpeliharanya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat dan menjadi sumber penyakit bagi orang lain. Dalam hal ini

¹¹⁴ Bunuh diri adalah tindakan sengaja (atas dorongan hati) untuk melaksanakan suatu perbuatan duniawi yang dapat menghilangkan nyawa sendiri atau kehancuran pada diri sendiri. Islam mengharamkan buru diri dengan alasan apapun. Bunuh diri oleh seseorang yang marah dan putus asa karena dorongan ambisi yang besar untuk meraih hal-hal duniawi seperti harta dan kekuasaan. Diantara faktor penyebab orang melaksanakan bunuh diri adalah takut ditimpah musibah yang menyakitkan, lari dari penyakit yang diderita baik yang masih ada harapan untuk sembuh maupun tidak, dan takut ditimpa musibah sepertirugi dalam berdagang, putus cinta dan gagal merahi studi. Lihat. Abdul Aziz Dahlan, (ed) *Ensiklopedi Islam*..., Jilid 2, hlm. 43-44. Perbuatan bunuh diri termasuk perbuatan keji dan menghancurkan. Orang yang melakukannya telah menyalahi fitra yang diciptakan oleh Allah kepadanya. Jika dia bunuh diri berarti telah menghancurkan atau merusak suatu yang bukan haknya. Karena Allahlah yang menciptakannya dan ruh serta hidup manusia adalah kah Allah. Lihat. AHMAD AL-Mursi, *Maqashid al-Syari'ah*..., hlm.28

¹¹⁵ Alaidin Koto, Ilmu Fiqih..., hlm.123

¹¹⁶ Q.S. Al- Baqarah ayat 179



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah melarang manusia untuk minuman-minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan, karena minuman keras dapat merusak akal.¹¹⁷

Akal merupakan sumber hikma (pengetahuan), sinar hidayah dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Melalui akal manusia dapat memahami perintah dari Allah. Serta akal menjadi pembeda manusia dengan makhluk lain.

Untuk mencegah kejahatan, maka di antara hak syara' terhadap akal adalah untuk memberikan sanksi atas pelanggaran fingsi akal. Kaernanya, syariat Islam memberikan sanksi kepada peminum khamar dan pengguna obat-obatan terlarang, apapun jenisnya dan dengan nama atau ciri apapun.

Keadaan mabuk menyedapkan padamnya pikiran, meredupkan cahaya akal. Melemahkan karakter, menghilangkan akhlak mulia. Keadaan tersebut juga menyebabkan kehinaan, kemorosotan, hancurnya kekuatan serta melemahnya fisik.

Selain itu dampak negatif dari *khamar* tersebut adalah berupa dampak sosial dalam bentuk kemarahan, kekerasan, perkelaian dan permusuhan di kalangan umat. Sedangkan dampak terhadap agama dalam bentuk menghadapi umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas agamanya.¹¹⁸

¹¹⁷ Ahmad al- Musri Husain Jahuar, *Maqashid al Syari'ah fi al-Islam*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 32

¹¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqih Maqashid al-Syariah*, ter. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm.29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Yakni terpeliharanya kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal ini dapat dilakukan dengan penataan kehidupan rumah tangga, serta perlu adanya keturunan yang sah dan yang jelas.

Oleh karena itu, segala usaha yang mengarah pada kehapusan atau merusak keturunan yang sah adalah perbuatan yang buruk. Amak Allah melarang zina. Untuk memelihara keturunan. Seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau menghinakan kemuliaan nasab itu. Nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan mendukung yang menghubungkan antara anggota nasab. Untuk itu Allah melarang perbuatan zina., karen dengan perbuatan zina membuat anak yang lahir tidak jelas nasabnya.

Sementara itu Yusuf al-Qaradhawi, memasukkan *hifzh al-ird* selain *al-kulliyat al-khams* yang ditetapkan Syatibi. Adapun argumentasi Yusuf al-Qaradhawi adalah karena al-Qur'an telah menyebutkan hukuman bagi orang yang menodai kehormatan, yaitu hukum mencemarkan nama baik atau kehormatan (*al-Qadzaf*). Ia membandingkan dengan adanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman (had) bagi orang yang murtad, dipahami pentingnya agama, dari adanya hukuman qishaas, diambil pemal aman akan pentingnya jiwa. Begitu juga adanya hukuman bagi pezina dipahami pentingnya keturunan/nasab, Adanya hukuman bagi pencuri dipahami akan pentingnya harta. Serta adanya hukuman bagi orang yang mabuk, dipahami pentingnya akal.¹¹⁹

Maka, dengan adanya hukuman atas orang yang mencemarkan nama baik orang lain, menunjukkan sama pentingnya hal tersebut dengan ahl-hal di atas. Karena kehormatan adalah martabat dan kemudian manusia.¹²⁰ Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia.

5) Memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Yankni dengan meningkatkan ekonomi dengan proposional melalui cara-cara yang halal dan baik. Banyak firman Allah memerintahkan manusia untuk mencari rezki, diantaranya adalah dalam surah al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

¹¹⁹ Yusuf al-Qaradhwai, Dirasah..., hlm.27

¹²⁰ Ibad.

4) Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Yakni terpeliharanya kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal ini dapat dilakukan dengan penataan kehidupan rumah tangga, serta perlu adanya keturunan yang sah dan yang jelas.

Oleh karena itu, segala usaha yang mengarah pada kehapusan atau merusakkan keturunan yang sah adalah perbuatan yang buruk. Amak Allah melarang zina. Untuk memelihara keturunan. Seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau menghinakan kemuliaan nasab itu. Nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan mendukung yang menghubungkan antara anggota senasab. Untuk itu Allah melarang perbuatan zina., karen dengan perbuatan zina membuat anak yang lahir tidak jelas nasabnya.

Sementara itu Yusuf al-Qaradhawi, memasukkan *hifzh al-'ird* selain *al-kulliyat al-khams* yang ditetapkan Syatibi. Adapun argumentasi Yusuf al-Qaradhawi adalah karena al-Qur'an telah menyebutkan hukuman bagi orang yang menodai kehormatan, yaitu hukum mencemarkan nama baik atau kehormatan (*al-Qadza'*). Ia membandingkan dengan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman (had) bagi orang yang murtad, dipahami pentingnya agama, dari adanya hukuman qishaas, diambil pemal aman akan pentingnya jiwa. Begitu juga adanya hukuman bagi pezina dipahami pentingnya keturunan/nasab, Adanya hukuman bagi pencuri dipahami akan pentingnya harta. Serta adanya hukuman bagi orang yang mabuk, dipahami pentingnya akal.¹¹⁹

Maka, dengan adanya hukuman atas orang yang mencemarkan nama baik orang lain, menunjukkan sama pentingnya hal tersebut dengan ahl-hal di atas. Karena kehormatan adalah martabat dan kemudian manusia.¹²⁰ Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia.

5) Memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Yankni dengan meningkatkan ekonomi dengan proposional melalui cara-cara yang halal dan baik. Banyak firman Allah memerintahkan manusia untuk mencari rezki, diantaranya adalah dalam surah al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

¹¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, Dirasah..., hlm.27

¹²⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan, manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya, serta dapat menambah kenikmatan materi dan geligi.

Selain itu, untuk memelihara harta kekayaan Allah melarang mencuri dan melarang bentuk pendaominasian kehidupan perekonomian dengan cara-cara yang zalim dan curang.¹²¹

Allah juga mengharamkan penimbunan dan monopoli barang perdagangan atau lainnya. Allah berfirman, dalam surat al-Taubah ayat 34

﴿يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

Perlindungan terhadap harta dapat dipahami :

- a) Memiliki hak untuk dijaga dari musuhnya, baik dari tindakan pencurian, perampokan, atau tindakan lain dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli.

¹²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*..., hlm. 315

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Harta tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubaazir.

a. *Kebutuhan hajiah,*

Kebutuhan hajiah, adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk tingkat menghilangkan kesulitan dan menolak segala bentuk halangan.¹²² Kehidupan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharury*, hanya merupakan penyempurna kebutuhan pokok, namun akan mengalami kesulitan. Maka untuk memenuhi kebutuhan ini Allah memberikan *rukhsah* kepada manusia, agar kebutuhan *daruriyah* dapat terlaksana.

Misalnya, dalam aspek ibadah, dibolehkannya seseorang mengqashar shalat dan diperbolehkannya seseorang tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan bagi seorang musafir, tapi harus mengqadhanya pada hari lain. Serta diperbolehkannya seseorang untuk bertayamum sebagai ganti wudhu' atau mandi junub ketika ketiadaan air bersi atau atau tidak dapat menggunakan air.¹²³

Kalau dianalisa contoh-contoh di atas dapat dipahami bahwa, untuk mewujudkan kebutuhan *daruriyah* diberikan *rukhsah* karena manusia berbeda dalam kesulitan untuk terwujudnya kebutuhan *daruriyah*. Kemampuan manusia dalam mewujudkan hukum berbeda tingkatannya. Apa yang mungkin dilakukan oleh seseorang dalam keadaan biasa

¹²² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih*, hlm. 123

¹²³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih*, hlm. 124; Satria Efendi, *Ushul Fiqih*..., hlm. 235

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(normal) mungkin orang-orang tertentu dirasakannya sangat berat dan berbeda di luar kemampuannya. Oleh karena itu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, Allah mengacualikan pihak-pihak tertentu tersebut dari tuntutan yang berlaku umum. Perintah sholat adalah wajib, tetapi manusia berada pada kondisi *masyaqqah* sholat tersebut boleh diqashar.

Dalam bidang *muamalah*, misalnya dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*as-salam*)¹²⁴, kerjasama dalam pertanian (*muzar'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semua itu disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar manusia (*dhururiyah*) di atas.

Dalam bidang *'uqubat*, Islam mewajibkan membayar denda (*diyat*) dan bukan qisas, bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyidak melamatkan jiwanya dari kelaparan.¹²⁵

b. Kebutuhan tahsiniah

Kebutuhan tahsiniah adalah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari yang lima dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Atau tingkatan dan sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarrim al Akhlaq* yang sifatnya

¹²⁴ Jual beli salam maksudnya adalah jual beli dimana barang yang dibeli tidak langsung ketika pembayaran dilakukan, melainkan kemudian, sebab barang yang dibeli itu tidak berada di tempat ketika transaksi dilakukan, Alaidin Koto, *ibid.*, hlm. 124

¹²⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqih...*, hlm. 235

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelengkap, berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemeslahatan sebelumnya, serta pemeliharaan tingkatan – tingkatan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mua'amat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam, namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang mormonis dalam pandangan akal sehat dan adat melengkapi kegiatan perkawinan, jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengajam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulitkan orang yang melakukan perkawinan.¹²⁶

Pada setiap peringkat yang telah dijelaskan diatas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at. Misalnya, ditetapkan adanya perimbangan (tamasul) dalam hukum qishas yakni sebanding hukuman yang dijatuhkan dengan tingkatan yang pernah dikerjakan. Hal ini bertujuan supaya tidak menimbulkan eksese yang berlebihan dan permusuhan haru.¹²⁷

Begitu juga halnya Allah mengharamkan zina untuk memelihara kehormatan keturunan, maka Allah juga mengharamkan seseorang laki-laki berkhilwat dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ini merupakan tindakan preventif dari perbuatan zina.¹²⁸

Dalam peringkat hajiyyat, misalnya ditetapkan khiyar dalam hal jual-beli untuk memelihara harta, untuk ditetapkan kafa'at dalam

¹²⁶ Fathurrahman, ibid., hlm. 130

¹²⁷ Muktar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT Al-Muarif, 1986), hlm. 337

¹²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 321; Muktar Yahya, *Dasar-Dasar..*, hlm 338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyah, contohnya ditetapkan tatacara tharah dalam rangka pelaksanaan shalat, untuk memelihara agama.¹²⁹

Mengetahui urutan peringatan *maslahat* di atas menjadi penting artinya, apabila dikaitkan dengan skala prioritas penerapan. Jika terjadi pertentangan antara satu *maslahat* dengan kemaslahatan yang lain, maka tingkat *daruriyat* menepati urutan pertama disusul oleh *hajiyyat* dan kemudian *tahsiniyat*.¹³⁰

Misalnya, makan dan minum adalah urusan dharury untuk memelihara eksistensi jiwa, sedangkan menjauhi barang-barang yang najis termasuk urusan *tahsini*. Oleh karena itu, jika seseorang tidak mendapatkan makanan yang halal, ia dibolehkan memakan bangkai. Sebab menjaga eksistensi jiwa lebih penting dari pada memelihara pada memelihara kesucian makanan.¹³¹ Dipernsasi kebolehan makanan bangkai di sini hanyalah sebatas keperluan saja.

Begitu juga halnya, jika berbenturan peringkat tahsiniat dengan hajiyyat, maka hajiyyah harus di dahulukan. Misalnya, melaksanakan sholat berjamaah adalah termasuk hal tahjiyyat. Maka, jika dalam sebuah komunitas umat Islam tidak terdapat imam yang memenuhi persyaratan

¹²⁹ Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam...*, hlm. 131

¹³⁰ Fathurrahman, *ibid.*, hlm. 132

¹³¹ Mukhtar Yahya, *Ibid*, hlm. 340

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, maka dibolehkan beriman kepada imam yang fasiq, demi menjaga sholat berjamaah yang sifatnya hajiyyat.¹³²

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa tujuan Allah menetapkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemudian, dari contoh tersebut terlihat bahwa Allah tidak pernah memberatkan manusia dalam menjalankan hukum Islam.

Unsur-unsur Maqashid al-Syariah inilah yang dijadikan bagian dari hak azazi manusia.

c. *Maqashid al-Syari'ah Denagan Beberapa Ijtihad*

Pengetahuan tentang Maqashid al-Syari'ah, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalalaf, adalah suatu hal yang sangat penting sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah¹³³. Serta menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, hal yang sangat penting lagi adalah untuk dapat menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan.¹³⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, tujuan utama disyariatkan hukum islam oleh tuhan adalah untuk kemaslahatan bagi manusiaserta menolak kemufsadatan, baik di dunia maupun si akhirat. Peranan mujtahid sangat penting untuk dapat menggali serta menemukan segi maslahat yang terkandung dalam menetapkan hukum.

¹³² Fathurrahman, *ibid.*, hlm. 132

¹³³ Adul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, hlm. 311

¹³⁴ Stria Efendi, *Ushul Fiqih*, hlm. 237

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Al- Mashalih al-Murslat

Sebelum penulis masuk pada pengertian Al- Mashalih al-Murslat terlebih dahulu akan di kemukan uraian tentang masalah secara umum dalam pemikiran ushul fiqh.

Masalah berasal dari kata salah dengan penambahan ‘Alif di awalnya secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Penegertian maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermamfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan demikian, maslahah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan memudharatan.¹³⁵

Secara terminologi, ada beberapa definisi maslahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi semua pengertian tersebut mengandung makna yang sama. Al- Gazali mengemukakan bahwa maslahah pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’¹³⁶. Sementara itu,

¹³⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, hlm. 323-324

¹³⁶ Al-Gazali, al- Mustafa Min ‘Ilm al-Ushul, tahqiq Muhammad Sulaiman, juz I, (Berit: Muassasah al-Risalah, 1997), hlm. 416

Abdul Wahab Khallaf, mengatakan bahwa masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.¹³⁷

Dalam Ushul fiqh dikenal ada tiga macam masalah, yaitu kemaslahatan yang mendapat dukungan baik jenis ataupun bentuknya.

Oleh syara' tersebut disebut dengan masla'ah al-mu'tabarah.¹³⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...* hlm. 198

¹³⁸ Moh. Dahlan, *Epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 179; Nasrun Harun. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: logos, 1996), hal 117-118; Romsy SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 162



BAB III

METODOLOGI

A. Lokasi penelitian

Tempat penelitian adalah: yang dilaksanakan di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Inragiri Hilir. Karena lokasi ini yang terdapat kasus setandar *pa'baji* dalam hukum perkawinan masyarakat Bugis di Pulau Kijang.

1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Pulau Kijang

Nama Kecamatan Reteh berasal dari nama sebuah sungai. Sungai tersebut bermuara 2 (dua) dan kedua-duanya muara tersebut di sungai Gangsal. Muara Sungai Reteh yang bertama posisinya terletak di perbatasan, Desa Sanglar dengan Desa Pulau Kecil yang sekarang dikenal dengan sebutan parit 13 atau Reteh Tanjung. Muara ke 2 (dua) terletak di perbatasan Kota Baru Retah dengan kota Baru Seberita.¹³⁹ Beberapa sumber penyebutan, Sungai Reteh itu sendiri berasal dari kata “letih”. Kata Ltih menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya loyo, lesu, tidak bertenaga, capek karena habis bekerja atau melakukan kegiatan berat. Selanjutnya kata letih itulah yang pada akhirnya berubah menjadi *Reteh*.

Sebagian sumber lagi mengatakan bahwa kata Reteh berasal dari kata Seretih. Seretih yaitu nama sebuah kampung diwilayah kekuasaan Raja Lingga yang mana masyarakat kampung tersebut mengungsi melalui Sungai Gangsal akibat peperangan dan pemukiman di sungai yang belum

¹³⁹ Dokumentasi, 15 November 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui namanya sehingga mereka namakan Sungai tersebut dengan nama asal kampung mereka yakni Seretih yang kemudian menjadi Reteh.¹⁴⁰ Wilayah Kecamatan Reteh adalah bagian dari wilayah kerajaan Keritang. (cikal bakal Kesultanan Indragiri). Dengan berdirinya kesultanan Indragiri yang berkedudukan di kota Raja (Rengat). Daerah kekuasaan kesultanan Inragiri meliputi Tembilahan, Tempuling, Sungai Luar, Anak Serkaden Enok. Sedangkan Reteh, Igal dan Mande diserahkan oleh Kesultanan Indragiri ke Kerajaan Bintan sebagai pejabat yang menguasai wilayah Reteh, Igal dan Mande maka pada tanggal 7 Januari 1833 di Istana Kota Parit Lingga dinobatkan Raja Lung dengan Gelar Tengku Sulung dengan jabatan sebagai penguasa di wilayah Reteh, Igal dan Mande, yang dilantik oleh Sultan Muhammad Syah.¹⁴¹ Dalam tatanan Pemerintahan, Reteh sejak tahun 1833 sampai dengan tahun 1858 di bawa pimpinan Raja Lung (Tengku Sulung) dengan pusat pemerintahannya terletak di kemuning. Akhirnya pada tanggal 7 November 1858 Raja Lung tewas dalam perjuangan melawan Belanda dalam pertempurannya di Desa Benteng. Bintan dibubarkan Stbl. 19 jo 190 tgl. 1-3-1913. Dengan bubarnya Kerajaan Bintan, diutuslah pejabat dari Kerajaan Lingga Daek dengan jabatan Amir (sekarang Camat) yaitu Raja Brine, Raja Usman, Raja Rafuh, Tengku Dut, Raja Nung bin Ja'far, Raja Maksum, Raja Cik dan Raja Husin.

¹⁴⁰ Dokumentasi, 15 November 2018

¹⁴¹ Dokumentasi, 15 November 2018

Selanjutnya dengan runtuhnya Kerajaan Lingga Riau, maka Amit di Reteh diangkat dengan ke[utusan Presiden yaitu:

- a. Raja Hasan 1916- 1917
- b. Nursiwan 1917- 1918
- c. Sultan Palembang 1918-1932
- d. Sidik 1932-1933
- e. Muhn. Samin 1933- 1935
- f. Muhn Zaid 1935-1937
- g. Muhn Sirin 1937-1939
- h. Bismirak 1939- 1941¹⁴²

Dalam perjalanan sejarah sejak didefinisikan sampai dengan tahun 2006, Kecamatan Tete mekar menjadi beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Keritang, kemudian Kecamatan Keritang Mekar lagi menjadi Kecamatan Keritang dan Kecamatan Kemuning. Pada tahun 2006 Kecamatan Reteh melebur menjadi 2 (dua) Kecamatan Reteh dan Kecamatan Sungai Batang, sehingga dengan demikian seluruh Wilayah Kecamatan Reteh pada akhir tahun 2006 sudah terpecah menjadi 4 (empat) bagian wilayah Kecamatan. Pada tahun 2013 desa kelurahan Kecamatan Reteh terbagi menjadi 10 desa dan 4 kelurahan, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Reteh adalah Pulau Kijang, Madani, Metro, Pulau Kecil, Sanglar, Seberang Sanglar, Mekar Sari, Seberang Pulau Kijang,

¹⁴² Dokumentasi, 15 November 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Terap, Sungai Mahang, Tanjung Labuh, Pulau Ruku, Sungai Asam, dan Sungai Undan.¹⁴³

Kelurahan Pulau Kijang berdiri pada tahun 1981 tepatnya 1 Juli 1981. Selama mulai berdirinya kelurahan Pulau Kijang sampai dengan sekarang sudah beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan. Lurah yang pertama kali menjabat sebagai kepala kelurahan Pulau Kijang yaitu Ahmad Abdullah masa pada tanggal 1 Juli 1981 -18 Februari 1989. Selama masa jabatan Ahmad Abdullah berakhir masa digantikan oleh Mohd. Thai, masa jabatannya dimulai dari 1 Februari 1989 – 12 Oktober 1991. Mohd. Thair Thaib menjabat sebagai kelurahan lebih kurang 2 tahun dan digantikan oleh Mohd Noer OE dan menjabat lebih kurang 4 tahun yaitu dari 12 Oktober -20 April 1995.¹⁴⁴ Setelah masa jabatan Mohd Noer OE berakhir maka digantikan oleh A. Rasyid, AMP dan digantikan oleh Maspin Thaib setelah itu digantikan oleh Hardiansyah. Pada masa memimpinya kantor kelurahan tidak lagi berada di Jalan Kelurahan melainkan telah dipindahkan ke Jalan Gunung Jati Pulau Kijang dan sampai saat sekarang ini yang memegang jabatan sebagai kepala Kelurahan adalah Ilhamzah.

2. Geografis

Sedikit pemandangan Pulau Kijang dari perairan saat naik speed boat Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 104° 10'

¹⁴³ Dokumentasi, 15 November 2018

¹⁴⁴ Dokumentasi, 15 November 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bujur Timur – 102° 32' Bujur Timur dan 0° 36' Lintang Utara – 1° 07' Lintang Utara dengan luas wilayah mencapai 1.160.597 Hektar. Iklim wilayah ini adalah iklim tropis basa dengan curah hujan 2.300 Milimeter.

a. Letak dan Luas Wilayah

Kelurahan Pulau Kijang merupakan bagian wilayah Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Jarak tempuk transportasi darat dari Kelurahan Pulau Kijang ke Ibu kota kabupaten 90 Kilometer, sedangkan ibu kota Propinsi 360 Kilometer. Jarak tempuh Kelurahan Pulau Kijang ke Propinsi 450 Kilometer, sedangkan luas wilayah Kelurahan Pulau Kijang 11.050 Kilometer.

b. Keadaan Alam

Kecamatan Reteh merupakan daerah tropis, pergantian musim hujan dan musim kemarau sangat mendung untuk tumbuh suburnya berbagai komoditas kelapa, palawija dan hultikultural, hutan bakau Nipah dan apai-api yang tumbuh di pesisir pantai merupakan tempat berkembang biaknya biota laut. Demikian pula hutan bakau sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir selain ikan dan udang.

c. Iklim

Curah pada bulan September sampai dengan bulan Februari rata-rata 186 mm., membuat area sawah tadah hujan di Kecamatan Reteh cukup untuk membuat suburnya tanah tersebut. Pergantian musim hujan ke musim kemarau lahan sawah tadah hujan berakhir fungsi sebagai lahan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanaman kedelai, jagung dan semangkat. Didaerah pasisir, pada musim Barat adalah saat yang dinanti-nantikan oleh parah nelayan dimana produktifitasi ikan dan udang meningkat sampai melebihi kebutuhan pasar. Sehingga surplus hasil ikan dan udang dipasarkan di Kuala Tungkal.

B. Populasi dan Sumber Penelitian

1. Jumlah Penduduk

Tabel 2

Jumlah Penduduk di Kelurahan Pulau Kijang
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	8.834	49,2 %
2	Perempuan	8.837	50,8 %
	Jumlah	17.671	100 %

Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang Maret Tahun 2018

Jumlah penduduk di Kelurahan Pulau Kijang berjumlah 17.671 Jiwa. Laki-laki berjumlah 8.834 orang (49,2%), dan perempuan berjumlah 8.837 orang. Masyarat Kelurahan Pulau Kijang merupakan masyarakat yang heterogin, dimana daerah ini dihuni berbagai suku bangsa. Penduduk Kelurahan Pulau Kijang terdiri dari berbagai suku bangsa antara lain:

Tabel 3

Jumlah Penduduk di Kelurahan Pulau Kijang
Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah	Presentase
1	Suku Bugis	5.301	35%
2	Suku Melayu	3.534	20%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Suku Banjar	3.004	17%
4	Suku Jawa	2.650	15%
5	Suku Minang	1.413	8%
6	Suku Batak	5.30	3%
7	China	3.53	2%

Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang Maret Tahun 2018

Di tenah-tenagah masyarakat yang heterogen tersebut tentunya berakibat pada beraneka budaya ibu yang sulit untuk dipisahkan pada setiap suku bangsa. Namun demikian, keberagaman budaya tersebut dalam wilaya Kelurahan Pulau Kijang selalu tumbuh dan terpelihara dengan baik, selalu dihargai, serta senantiasa membawur dalam suatu budaya baru dengan bercirikan Budaya Adat Melayu.¹⁴⁵

2. Mata Pencarian

Mata pencarian Di Kelurahan Pulau Kijang yaitu pertanian, perkebunan dan pertenakan. Di Kelurahan Pulau Kijang tanahnya cukup luas yang dimanfaatkan sebagai bidang usaha pertanian yaitu padi 800 Hektar, Jagung 02 Hektar, Sayuran 65 Hektar. Kemudian Bidang Perkebunan yaitu kelapa 7.674 Hektar, Kopi 23 Hektar. Dan bidang pertenakan yaitu sapi 150 ekor dan kambing 200 ekor.

Tabel 4
Perkebunan di Kelurahan Pulau Kijang

No	Jenis Tanaman	Jumlah Lahan Produksi
1	Padi	800 Hektar
2	Sayuran	65 Hektar
3	Kelapa	7,674 Hektar
4	Kopi	23 Hektar

Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang Maret Tahun 2018

¹⁴⁵ Dokumentasi, 15 November 2018

Tabel 5
Jumlah Penduduk di Kelurahan Pulau Kinjang
Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Presentase
1	Petani	30%
2	Pekebun	20%
3	Pegawai Negri Sipil	10%
4	Pensiunan Pegawai Sipil	5%
5	Pedagang	10%
6	Nelayan	15%
7	Buru	10%

Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang Maret Tahun 2018

Kelurahan Pulau Kijang sebagai besar penduduknya mata pencarian sebagai petani 30%, disamping itu ada juga bekerja disektor pemerintahan baik itu sebagai Pagawai Negri Sipil 10%, pensiunan Pegawai Negri Sipil 5%. Disamping itu juga ada yang bekerja sebagai pedagang 10%, nelayan 15%, buruh 10%.¹⁴⁶

3. Pendidikan

Pendidikan sebagai wahana untuk membahakali manusia dengan pengetahuan sebagai modak dasar pembamgungan sebagai modal dari pagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perkonomian seseorang. Dalam usaha pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan disegal sumber daya manusia dan pemerintahaan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental), maka sekolah-sekolah maupun swasta yang tergambar dalam bentuk tabel dibawa ini.

¹⁴⁶ Dokumentasi, 15 November 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 6
Klafikasi Penduduk di Kelurahan Pulau Kijang
Menurut Tingkatan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1.	Tindak Sekolah	10%
2	Sekolah Dasar	30%
3	Sekolah Menengah Pertama	20%
4	Sekolah Menengah Atas	40%

Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang Maret Tahun 2018

4. Kepegawaian

Pemerintahan Kecamatan Reteh berdasarkan kurun waktu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Sejak zaman penjajahan, Reteh dibawah kekuasaan Kerajaan Keritang, setelah berdirinya Kesultanan Indragiri Reteh diserahkan ke kerajaan Bintan, dengan runtuhnya Kerajaan Bintan Reteh dibawah Residen.
- b. Zaman Penjajahan, kepala pemerintahan dengan sebutan amir dan sejarah Kecamatan Reteh Trcatat 16 Amir / Camat.
- c. Zaman Kemerdekaan, Kepala Pemerintahan di Kecamatan Reteh dipimpin oleh siring Camat, sampai dengan tahun 2014 telah tercatat sejumlah 38 Orang (tiga puluh delapan orang) pejabat Camat di Kecamatan Reteh.¹⁴⁷

Pada akhir tahun 2013 Pemerintahan Kecamatan Reteh di bawah pimpinan seorang Capamat, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya di Kecamatan Reteh berjumlah 434 Orang. Rincian tentang

¹⁴⁷ Dokumentasi, 15 November 2018



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pegawai yang bertugas di Kecamatan Reteh sebagai mana dimuat dalam data-data tabel dibawah ini:

Tabel 7
Jumlah tabel Pegawai Kecamatan Reteh Tahun 2018

No	Instansi	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kantor Kecamatan Reteh	10	2	12
2	Kantor Kepolisian Sektor Reteh	20	-	20
3	Kantor Komando Daerah Militer 07 Reteh	4	-	4
4	Kantor Lurah Pulau Kijang	3	2	5
5	Kantor Urusan Agama	4	1	5
6	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga	172	224	396
7	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Pertanian Pertanian	7	1	8
8	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Perhubungan	3	-	3
9	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Kesehatan	14	15	29
10	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Perkebnan Kehutanan	17	1	18
11	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah	2	1	3
12	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Perikanan dan Kelautan	1	-	1
13	Kantor Pos Bea dan Cukai	1	-	1
14	Kantor Syahbandar	3	-	3
15	Unit Pembantu Teknis BKCKB		3	3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	Mantra Statistik	1	-	1
17	Kantor Kepurustakaan	2	1	3
18	Petugas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah	2	-	2
19	Bank Rakyat Indonesia Unit Pulau Kijang	4	2	5
20	Perseroan Terbatas Pos Indonesia	2	-	2
22	Perusaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri	2	-	2
23	Kepala Desa	9	-	9
24	Perangkat Desa	82	6	87
Jumlah				

Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang Maret Tahun 2018

Tabel 8

Surpai wawancara

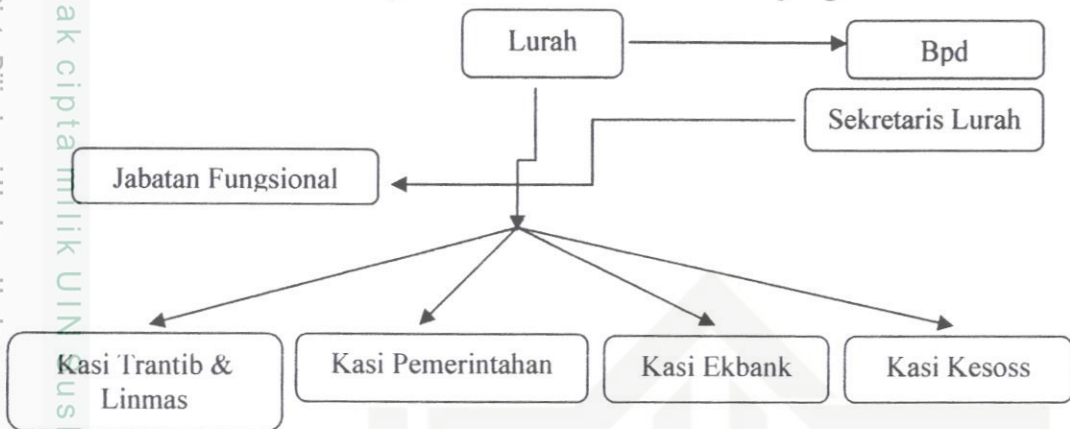
No	Surpain	Persentase
1.	Setuju dengan Tinggi tradisi <i>pa'biji</i>	10%
2	Tidak Setuju dengan Tinggi taradisi <i>pa'biji</i>	30%
3	Netral dengang <i>pa'baji</i>	20%
4	Tidak ada pendapat	40%

Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang Maret Tahun 201

5. Agama

Agama adalah masah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa di pisahkan dari diri seseorang. Masyarakat dikelurahan pulau kijang mayoritas beragama Islam dan mereka taat dalam menjalankan ibadah. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah, di dukung dengan adanya sarana penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan Agamanya.

6. Struktur Organisasi Kelurahan Pulau Kijang



Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang Maret Thun 2018

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kelurahan juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dengan di sertai pembiayaan dan sarana dan perasarana. Fungsi Kelurahan :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
2. Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pelayanan masyarakat.
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pemeliharaan prasarana dan fasolitas umum.
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kelurahan adalah:

1. Lurah .
2. Sekretaris.
3. Seksi pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
6. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi Lurah adalah:

1. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tugas dan fungsi Kelurahan.
2. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sekretaris Kelurahan adalah membantu Lurah dibidang administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan.

Sedangkan fungsinya adalah:

1. Penyelenggaraan koordinasi terhadap, kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan.
2. Pengumpulan Data dan perumusan Program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
3. Pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
5. Pelaksanaan urusan Surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan pemerintahan.
2. Mengumpulkan, Mengolah dan mengevaluasi data bidang pemerintahan.
3. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
4. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kependudukan.
5. Membantu tugas-tugas bidang pendata dan penumutan Pajak bumi dan Bangunan.
6. Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum.
7. Membantu tugas-tugas bidang dibidang pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai bidang dan tugasnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Kegiatan bidang ketertiban.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban.
3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban.
4. Melakukan pembinaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
5. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat, serta melakukan kegiatan pengumuman akibat bencana alam dan bencana lainnya.
6. Membantu pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan Daerah.
7. Membantu pelayanan perizinan keramaian.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Kegiatan bidang Kesra.
2. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat.
3. Melakukan pembinaan ritual keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat.
4. Membantu/Memberikan pelayanan pengurusan administrasi untuk perkawinan dan pelaksanaan akad nikah.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Membantu/Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat keterangan sebagai persyaratan penerbitan akta yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perceraian, an surat keterangan persyaratan haji.
6. Membantu memngumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya.
7. Membantu pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang kemasyrakatan yang lain.
8. Membantu kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan shodaqah.
9. Membantu pelaksanaan pengumutan dana bantuan yang sah.
10. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

1. Penyusun Rencana Kegiatan Bidang dan pembangunan.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengepaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan
3. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya.
4. Melakukan pelayanan kepada masyarakay di bidang perekonomian dan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan suadaya dan parsipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
6. Membantu pembinnan kooedinasi pelaksanaan pembangunan seeta menjaga dan memelihara perasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan.
7. Melakukan admitrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan.
8. Memnggumpulakan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.
9. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkang prodiktipitas pertanian yang meliputi pengaturan sarana dan perasarana pengalihan dan koordinasi dengan dinastenis terkait.
10. Membantu pelayanan perizinan dibidang pembangunan dan perekonomian.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibrikan oleh lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Gambaran Umum Kantor Agama Kecamatan Reth Kelurahan Indragiri Hilir Desa Pulau Kijang.

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Inrdra Giri Hilir merupakan kabupaten denga wilayah yang sangat luas, dipisahkan oleh parit-parit. Sehingga kabupaten di perbatasan Riau Jambi ini mendapat gelar Negeri



Seribu Parit dengan wilayah yang luas ini kinerja jajaran kantor Agama Inhil dituntut harus mampu bekerja maksimal dan efisien.

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun Visi dan Misi serta program kerja yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang taat melaksanakan ajaran agamanya, Dinamis dan rukun yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tahun 2000.

b. Misi

1. Mewujudkan pendidikan Agama dan keagamaan yang berkualitas.
2. Mewujudkan masyarakat Indragiri Hilir yang rukun, damai dan sejahtera.
3. Mewujudkan administrasi yang berdaya guna.

c. Tujuan

1. Terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat dalam kehidupan beragama, pendidikan dan pelaksanaan haji.
2. Terjadinya SDM yang berkualitas sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
3. Meningkatkan iman dan takwa umat beragama di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tercipta kerukunan inter dan antar umat beragama di Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Terciptanya partisipasi umat beragama melalui pemberdayaan sarana dan pranata keagamaan.
6. Terwujudnya sistem informasi keagamaan melalui peningkatan SDM aparatur sarana dan prasarana.

Untuk mendukung kinerja Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) di Kecamatan, Kankemenag Kab. Inhil telah menetapkan 20 Kepala KUA untuk setiap kecamatan yang ada di Inhil, yaitu Batang Tuaka, Concong, Enok, Gaung, Gaung Anak Serka

C. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian setandar *pa'baji* atau jujuran lamaran yang dilakukan khususnya bersuku Bugis dan beragama Islam di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh. Kab. Inra Giri Hilir.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Bugis di Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inra Giri Hilir.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah implentasi setandar *pa'baji* atau jujuran lamaran pada masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inra Giri Hilir.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Bugis yang ada di Kelurahan Pulau Kijang Kec. Reth Kab. Inra Giri Hilir. Menetapkan tiga pasang sebagai sampel masyarakat suku Bugis yang terlibat langsung dalam pelaksana tersebut.

4. Sumber data.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat suku Bugis, pemuka masyarakat dan orang-orang yang mengetahui tentang pelaksanaan setandar *pa'baji* atau jujuran lamaran tersebut.

5. Metode pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengamati langsung lapangan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa atau dikumpulkan.
- b. Interview (wawancara) adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama. Dalam hal ini penyusun mengumpulkan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan mengempukan pertanyaan maupun analisa untuk mengambil keputusan / kesimpulan. Disamping itu juga menggunakan wawancara bebas, karna hal ini akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memudahkan diperoleh data secara mendalam. Wawancara dilakukan pada informasi, toko Agama dan toko adat setempat.

- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data-data terkumpul penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisis sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan bentuk analisa data kualitatif. Data yang sudah terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dideskripsikan sebagaimana yang terjadi di lapangan kemudian dibandingkan dengan teorin atau konsep yang sesuai dengan hukum Islam sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan hukum.

7. Teknik penulisan.

- a. Metode induktif, yaitu analisa yang bertitik dari data yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yakni analisis yang bertitik tolak dari suatu keadaan yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus
- c. Dekriptif yaitu, mengumpulkan data dan menyusun data yang diperlukan dalam penelitian ini.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam al-Qur' an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud. Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hambanya.

Masalah pencatatan nikah ini menempati terdepan dalam pemikiran *fiqh* modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Muhammad Siraj. " *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan* " dalam *Islam, Negara dan Hukum*. Seri INIS XVI Kumpulan Karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar. (Jakarta : INIS, 1993).. hlm. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan standar *pa'baji* perkawinan suku Bugis yang hidup di propinsi Sumatra khususnya di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh disebut "*Appabottingeng ri Tana Ugi*" terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat Bugis Bone yang berada di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Retah yang betul-betul masih memelihara adat istiadat tersebut.

- a. Mattiro Merupakan suatu proses dalam penyelenggaraan perkawinan. Mattiro artinya melihat dan memantau dari jauh atau *mabbaja laleng* (membuka jalan).
- b. Mapessek-pessek (mencari informasi) saat sekarang ini, tidak terlalu banyak melakukan *mapessek-pessek* karena mayoritas calon telah ditentukan oleh orang tua mempelai laki-laki yang sudah betul-betul dikenal
- c. *Mamanu'-manu'* istilah dalam suku Bugis (Orang Makassar menyebutnya jangan-jangan) yang berarti menjalankan usaha sesuai dengan sifat burung. Kata ini berasal dari *mamanu'-manu'*, yang artinya burung. Di antara sifat burung yang diketahui adalah burung peliharaan yang pandai berbicara.

- d. *Mallino* artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi.
 - e. Hantaran dalam prosesi perkawinan yaitu suatu pemberian berupa barang sebagai bentuk penghormatan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, hal ini merupakan ungkapan rasa cinta dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan wanita yang ingin dijadikan istri atau calon mempelai wanita.
2. Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reth Kabupaten Inragiri Hilir tentang setandar *pa' baji* (uang jujur) adalah tradisi adat Bugis tidak asing dengan istilah *pa' baji* atau *panai* yaitu uang jujur dalam adat pernikahan asli suku Bugis. *Pa' baji* atau *panaik* itu mendefinisikan sebuah aturan untuk memberikan harta benda dari pihak laki-laki ke pihak keluarga perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Ukuran besaran harta benda ini tergantung kedudukan dan pendidikan perempuan yang di lamar. Jadi, semakin tinggi pendidikan atau keturunan (ningrat) wanita, semakin tinggi pula *pa' baji* atau *uang panaik* yang diberikan. *Pa' baji* atau uang hantaran yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh wali mempelai perempuan akan berimplikasi dengan tidak ada *pa' baji* maka tidak akan ada akad nikah pernikahan. Dampak hukum lainnya, hubungan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi, *salariang* (kawinlagi), perzinahan, anak yang lahir dari perzinahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan bermasalah dengan nasabnya. Maka tidak akan tercapailah salah satu tujuan syari'at dalam pernikahan yaitu menjaga nasab keturunan (*hifzdu al-nasl*).

3. Hukum maqosyid syari'ah tentang *pa'baji* atau jujuran lamaran dalam hukum Islam. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Sehingga adat istiadat masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh masih berpegang teguh dengan *pa'baji* atau uang jujuran yang makin lama makin tinggi *pa'bajinya*. Dengan alasan adalah:

- a. Adanya *pa'baji* atau uang hantaran dinilai sebagai keluarga mempelai sedekah dengan memberikan makanan atau jamuan kepada orang lain yang. Sedekah adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya fakir dan miskin. Harta itu disebut dengan sedekah karena didalamnya terkandung berkah penyucian jiwa/*Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), pengembangan dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat. Disamping sedekah wajib, ada juga sedekah yang disunnahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Hal ini disebabkan karena anjuran dari al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah tidaklah terikat.

b. Adanya *pa'baji* bertujuan membuat acara walimatul *urusy*.

Pemaknaan semacam ini bisa dipahami dari pertimbangan bahwa dalam walimah, kedua mempelai “*berkumpul*” dalam satu majelis. Sedangkan secara syariah, walimah didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pascapernikahan. salah satu kesunnahan dalam pernikahan adalah mengadakan walimah. Jika dilihat dari sudut pandang kebahasaan, walimah berasal dari kata *الولم* yang artinya “*berkumpul*”. Pemaknaan semacam ini bisa dipahami dari pertimbangan bahwa dalam walimah, kedua mempelai “*berkumpul*” dalam satu majelis. Sedangkan secara syariah, walimah didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pascapernikahan. Memperkenalkan dan mengumpulkan seluruh saudara dan pamili dari pihak perempuan dan pihak laki untuk menjalin ukwah dan keagraban diantara kedua pihak laki-laki dan pihak perempuan. Salah satu kesunnahan dalam pernikahan adalah mengadakan walimah. Jika dilihat dari sudut pandang kebahasaan, walimah berasal dari kata *الولم* yang artinya “*berkumpul*”. Pemaknaan semacam ini bisa dipahami dari pertimbangan bahwa dalam walimah, kedua mempelai “*berkumpul*” dalam satu majelis. Sedangkan secara syariah, walimah didefinisikan sebagai undangan jamuan makan pascapernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Adanya *pa'baji* bertujuan silaturahmi atau hubungan persaudaraan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat kita, umumnya bangsa Indonesia. Selain dengan kunjungan dalam hidup bertetangga dan bersaudara seringkali pula dilakukan secara massal.¹⁸⁸

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis mengutarakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Adapun saran-saran yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Saran penulis kepada orang tua dalam hal ini bapak atau kakek yang menyandang status sebagai wali yang mempunyai wewenang dalam menikahkan anak perempuan atau cucunya, harus terlebih dahulu menentukan sikap terhadap dirinya sendiri, apakah layak untuk Pa'Baji, uang panai (uang jujuran). Saran penulis kepada Masyarakat awam, bahwa antara orang tua dan anak hendaklah saling mengerti dan memahami perekonomian untuk setelah menjasi keluarga. Dalam hal ini memiliki kemaslahatan yang lebih besar, karena tujuan perkawinan tidak hanya sekedar menjalin hubungan dua pihak secara individual antara suami istri namun lebih jauh mempererat tali hubungan antara keluarga pihak suami dan pihak isteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸⁸ Kasman Wawancara 28 Desember 2018 di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan penjelasan sebagai bahan kajian awal bagi penelitian berikutnya jika meneliti masalah yang berkaitan dengan persoalan jujuran dan pernikahan. Diharapkan berguna dan menjadi masukan, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan analisis lebih mendalam tentang persoalan *pa'baji, uang panai* (uang jujuran).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara untuk Pemuka Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang, Pelaku Hantaran, Pukul 16.30 WIB

Nama : Ambo Sakka
Alamat : Pualu Kijang Kabupaten Indra Girihili
Hari/ tanggal wawancara : 26 Februari 2018
Tempat : Kediamaannya

1. Apa arti *pa'baji* ?
2. Kenapa harus adanya *pa'baji* di dalam adat Bugis di daerah Kelurahan Pulau Kijang ?
3. Apa sebenarnya ketentuan *pa'baji* ?
4. Apa tujuan *pa'baji* itu di dalam adat Bugis di daerah Kelurahan Pulau Kijang?
5. Berapa banyak *pa'baji* yang harus di persiapkan oleh laki-laki untuk meminang perempuan Bugis ?
6. Apa perbedaan *sompa* dengan *pa'baji* ?
7. Aruskah kita mengikuti *pa'naji* untuk meminang anak gadis Bugis dengan laki-laki bedah sukunya ?

UIN SUSKA RIAU



INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara untuk Pak RT Paret Dg. Pasandre

Nama : Kasman
Alamat : Pualu Kijang Kabupaten Indra Girihili
Hari/ tanggal wawancara : 28 Desember 2018
Tempat : Kediannya

1. Apa arti *pa'baji* ?
2. Kenapa harus adanya *pa'baji* di dalam adat Bugis di daerah Kelurahan Pulau Kijang ?
3. Apa sebenarnya ketentuan *pa'baji* ?
4. Apa tujuan *pa'baji* itu di dalam adat Bugis di daerah Kelurahan Pulau Kijang?
5. Berapa banyak *pa'baji* yang harus di persiapkan oleh laki-laki untuk meminang perempuan Bugis ?
6. Apa perbedaan *sompa* dengan *pa'baji* ?
7. Aruskah kita mengikuti *pa'naji* untuk meminang anak gadis Bugis dengan laki-laki bedah sukunya ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN PENELITIAN

Pedoman Wawancara untuk sesepu masyarakat Pualu Kijang

Nama : H. Dg. Mabbate
 Alamat : Pualu Kijang Kabupaten Indra Girihili
 Hari/ tanggal wawancara : Sabtu 10 November 2018 dan Rabu 24 April 2019
 Tempat : Kediannya

1. Apa arti *pa'baji* ?
2. Kenapa harus adanya *pa'baji* di dalam adat Bugis di daerah Kelurah Pulau Kijang ?
3. Apa sebenarnya ketentuan *pa'baji* ?
4. Apa tujuan *pa'baji* itu di dalam adat Bugis di daerah Kelurah Pulau Kijang?
5. Berapa banyak *pa'baji* yang harus di persiapkan oleh laki-laki untuk meminang perempuan Bugis ?
6. Apa perbedaan *sompa* dengan *pa'baji* ?
7. Aruskah kita mengikuti *pa'naji* untuk meminang anak gadis Bugis dengan laki-laki bedah sukunya ?



DOKUMEN (FOTO-FOTO)

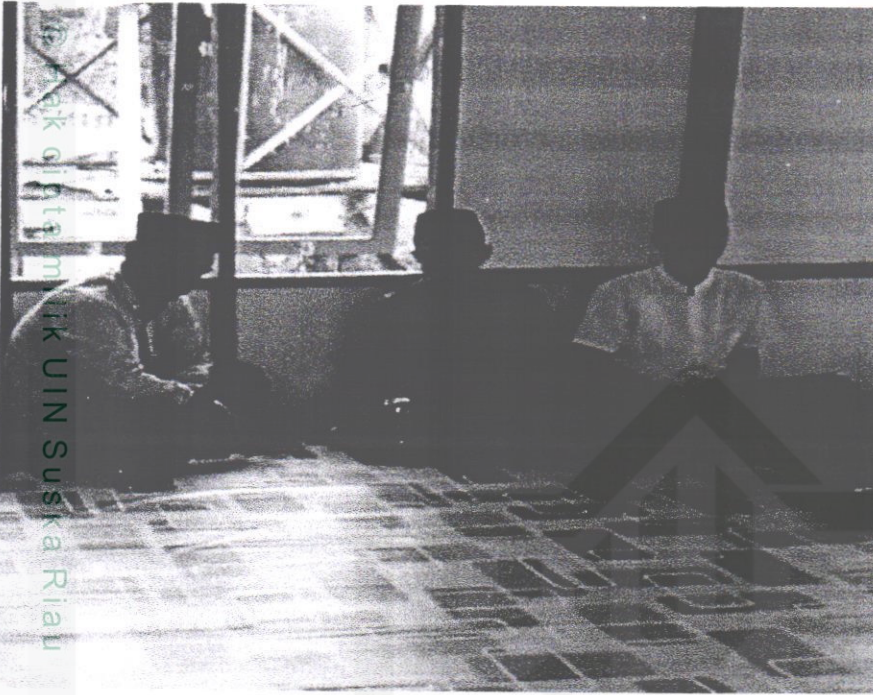
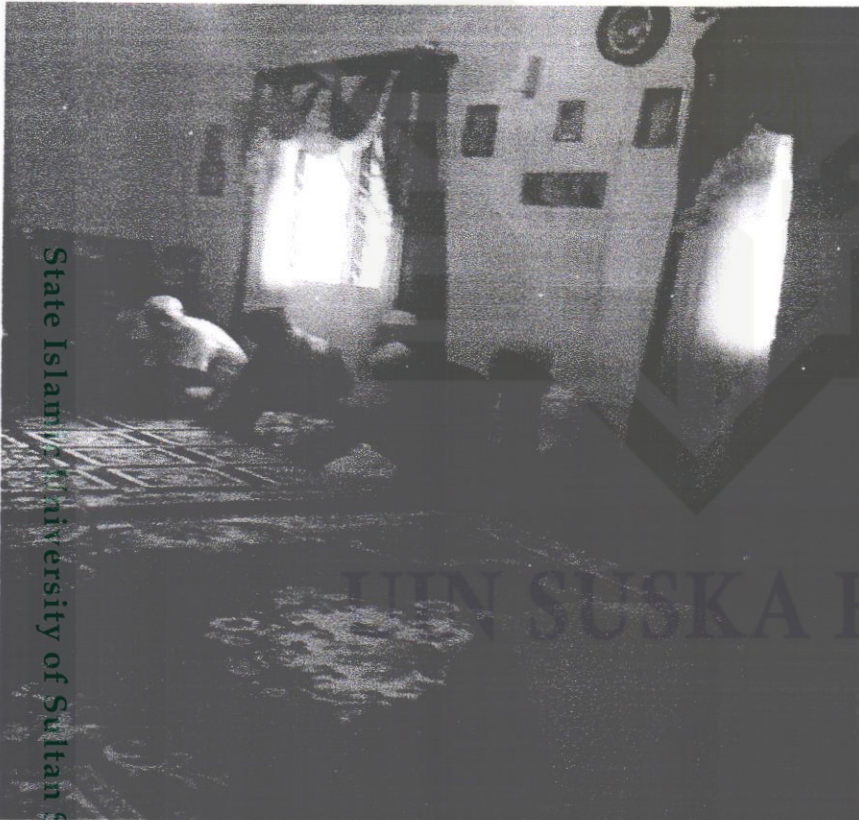


Foto disaat wawancara dengan Pak Kasman sebagai RT
Desa Paret Pandre



Acara sebelum mappenre dui uang hantaran (uang pa'baji)
Rumah wali perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Acara tanda persetujuan jumlah uang pa'baji yang disepakati oleh wali calon mempelai perempuan



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Acara perhitungan uang hantaran dari pihak keluarga calon mempelai perempuan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya, atau tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah uang pa' baji adalah 50.000.000 selain mahar dan sebagainya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Uang setelah selesai perhitungan *pa' baji* di berikan kepada orang tua calon Istri

Foto foto

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Resepsi perhitungan uang *paba'ji* di rumah calon isri di Pulau Kijang



Daftar Pustaka

- Abu Abdillah al-Qurtubi Imam, *al-Jami'il Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikri,tt), Juz XIV, Al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimy*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIII,
- Al-Jurjani Ali Ahmad, Hikmah *al- Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1974).
- Al- Mahmud al-Aqqad Abbas, *al-mar'ah fi al-Qur'an*. (Kairo : Nahdhah Misr, 2003
- Ahmad Saebarani Beni, *Fiqih Munakahat*, (CV.PUSTAKA SETIA, Bandung, 2009), hlm: 260
- As-Syyid Al-Iragy Bustamin *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*. (Penerbit Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, Cetakan, 1997),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 50
- Abdul Rahman Ghozali Prof. Dr, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010)
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi. 1986).
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007).
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres.2000).
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga cetakan kedua*, (Jakarta, Remaja Rosdakarya : 2012).
- Aminuddin Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Ahmad Saebarani Beni, *Fiqih Munakahat*, (CV.PUSTAKA SETIA, Bandung, 2009).
- Aziz Muhammad Azzam Abdul, *Fiqih Munakahat (Kithbah, Nikah dan thalaq)*, (Jakarta: Amzah, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdu Mun'im Salim Amru, *Panduan Lengkap Nkah*, (Solo: Daar An Naba", 2010).
- Lihat tema "Syara'a dalam "Mu'jam al-fazh al-Qur'an al-karim, juz 2, (Kairo' Al-lighah)
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Dirasah fi al-maqashid al-syari'ah*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007).
- Al-Fadhil Abi 'Abd al-Salam ibn Muhammad ibn 'Abd al-Karim, *al-Imamal-Syatiby wa Manhaj al-Tajdidy fi Ushul al-Fiqih*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, 2001)
- Al-Qaradhawa Yusuf *Fiqih Maqashid Syaria'ah*, terj Arif Munandar. (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- 'Audah Jasir, *Multaqa al- Imam al- Qardhawi ma'a al-Ashabi, al-Talamiz, Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Syaikh al- Qardawi*, (Funduq al-Ridaz Kalrton, 2007).
- Al- Musri Husain Jahuar Ahmad, *Maqashid al Syari'ah fi al-Islam*, terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Dirasah fi Fiqih Maqashid al-Syariah*, ter. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007).
- Al-Qaradhawa Yusuf *Fiqih Maqashid Syaria'ah*, terj Arif Munandar. (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2006,)
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Dirasah fi al-maqashid al-syari'ah*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007).
- Al-Gazali, al- Mustafa Min 'Ilm al-Ushul, *tahqiq Muhammad Sulaiman*, juz 1, (Beriut: Muassasah al-Risalah, 1997).
- Bakri Asfri jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah; Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1996)
- B Hallaq Wael, *Sejarah Tiori Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- B Hallaq Wael, *ibid*, Tetap ada ulama yang mengurytkannya dengan *hifzh al-dhin* , *hifzh al-nafs* , *hifzh an-nas*, *hifzh al- 'aql* dan *hifzh al-mal*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

, lihat Ali Jum'ah Muhammad, al-Madkhal, (Kairo: al-Ma'had 'Aly Lilfikir al-Islamy, 1996).

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2001)

Dewi Gemala, SH, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005)

Dahlan Moh, Abdullah Ahmed an-Na'im; *Epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Djamil Fathrrahman, *Filsafat Hukum Islam I*, (Jakarta: Logos, 1997).

Djazuli Ahmad, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)

Dahlan Moh, *Epistimologi Hukum Islam*, (Yogkarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Dahlan Moh, Abdullah Ahmed an-Na'im; *Epistimologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Fazlurrahman, *Islam, ahli bahasa Ahsin Muhammad* (Bandung : Pustaka, 1984).

Harun Nasrun. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: logos, 1996),

Ishak Abu al-Syatibi, *al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz II, (Beirul: Dar al- Ma'rifah, tt).

Indra Hasbi, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta : Penamadani, 2004).

Jaya Bakri Asfri, *Konsep Maqashid Syari'ah; Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1996)

Kamil Muhammad Uwaidah,, *Fiqh Wanita*, Jakarta :(Pustaka Al-Kautsar, 2007),

Koto Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Lihat tema “Syara’a dalam “Mu’jam al-fazh al-Qur’an al-karim, juz 2, (Kairo’ Al-lighah).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manzur Ibn, *Lisan al-Arab*, (kairo: Dar-al ma'arif, 1119).
- Murniatmo Gatut *Khazanah Buaya Lokal* , (Yogyakarta, November 2000)
- Mansyur Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994).
- Rusli Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Romsi SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta; Gaya Madia Pratama, 1999).
- Rahman I. Doi A, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah/Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Peserta, 2002)
- Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Latar belakang nasab dan kehidupan keluarganya serta tahun kelahirannya belum banyak diketahui. Ia wafat tahun 790 H, karya gemilangnya adalah kitab *al-muwafaqat* dan *al-I'tisham*. Lihat. Abi al-Fadhil 'Abd al-Salam ibn Muhammad ibn 'Abd al-Karim, *al-Imam al-Syatiby wa Manhaj al-Tajdidy fi Ushul al-Fiqih*, (Kairo: al-Maktabah al-Islamiyah, 2001).
- Siraj Muhammad. “ *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan* “ dalam *Islam, Negara dan Hukum*. Seri INIS XVI Kumpulan Karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar. (Jakarta : INIS, 1993).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, ,2006)
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung Al-Ma'arif, 1990)
- Sohari Sahrani Tihami, *Fqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Syarifuddin Amir, *Usul fiqih, jilid I*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009)
- Thasyib Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya : PT. Risalah Gusti, 1994)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thahir Muhammad Ibn Asyur, *Maqashid al-syari'ah al-Islamiyah*, (Dar-Al-Fajr, 1999).

Tihami A, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bulan Bintang , Jakarta,1975).

Wahab Khalaf Abdul, *Ilmu Usul Fiqih*, terj. Muh. Zuhri, (Semarang: Toha Putra, 1994).

Yahya dan Fathurrahman Muktar, *Dasar-dasar pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT Al-Muarif, 1986).

Wahab Khalaf Abdul, *Ilmu Usul Fiqih*, terj. Muh. Zuhri, (Semarang: Toha Putra, 1994).



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU
 1. Dilarang mengutip sebagai hak cipta atau sebagai hak milik.
 2. Dilarang mengutip sebagai hak cipta atau sebagai hak milik.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Sudirman
 ID Number : 21692104885
 Date of Birth : April 21, 1996
 Sex : Male
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 65
 Structure & Written Expressions : 38
 Reading Comprehension : 50
 Overall Score : 510

Expiry Date : August 12, 2020



English Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 858832
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M.Ag

Mahyudin Syukri, M.Ag
 NIP. 19720421 200604 1 003



UIN Suska Riau

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER



UIN Suska Riau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Sudirman

Nomor ID : 21692104885

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tanggal Lahir : 21 April 1986

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع	40 :
القراءة	40 :
القواعد	40 :
النتيجة	400 :

Berlaku Hingga : 25 Maret 2020

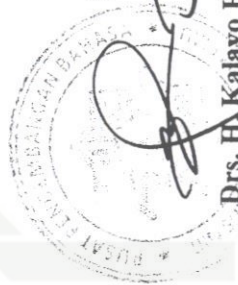


Arabic Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed-TESOL
The Head of Language Development Center



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX.1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : <http://uin-suska.ac.id> E-mail : pps_uinsuskariau@gmail.com

Nomor : Un-04/PPs/TL.00/3930/2018

Sifat : Penting

Lamp : Satu Berkas

Hal : Izin Riset/ Penelitian

Kepada Yth:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	: Sudirman
NIM	: 21692104885
Tempat dan Tanggal Lahir	: Benteng, 21 April 1986
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: IV (Empat)
Program	: Magister (S2) Program Pascasarjana UIN Suska Riau
Judul Tesis	: Standar Pa'baji' dalam Hukum Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Pulau Kijang

Sedang melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis / menyelesaikan kuliah pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan dapat diberikan Rekomendasi/Izin Penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Demikianlah disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 17 Oktober 2018

Direktur,



Prof. Dr. Afrizal. M, MA

NIP. 19591015 198903 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
Tembilahan Kode Pos 29211

REKOMENDASI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2018/325

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/14818 Tanggal 22 Oktober 2018, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Thesis**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SUDIRMAN**
NIM : 21692104885
Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S2
Alamat : Jl. Pahlawan Kec. Reteh
Judul Penelitian : **STANDAR PA'BAJI DALAM HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KELURAHAN PULAU KIJANG**
Lokasi Penelitian : **KELURAHAN PULAU KIJANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 November 2018 s/d 13 Februari 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 13 November 2018

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kabid Politik dan Kemasyarakatan,



HARYONO KARIM

Pembina

NIP. 19750421 199403 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/14818
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/PPs/TL.000/3930/2018** Tanggal 17 Oktober 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: SUDIRMAN
2. NIM / KTP	: 21692104885
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA
4. Konsentrasi	: HUKUM KELUARGA
5. Jenjang	: S2
6. Judul Penelitian	: STANDAR PA'BAJI DALAM HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KELURAHAN PULAU KIJANG
7. Lokasi Penelitian	: KELURAHAN PULAU KIJANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Berhubungan

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/14818

TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET

DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/PPs/TL/00/3930/2018** Tanggal 17 Oktober 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SUDIRMAN |
| 2. NIM / KTP | : 21692104885 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Konsentrasi | : HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : STANDAR PA'BAJI DALAM HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KELURAHAN PULAU KIJANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN PULAU KIJANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

- Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Bupati Indragiri Hilir
 3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
 4. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
 5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
Tembilahan Kode Pos 29211

REKOMENDASI PENELITIAN DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2018/325

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/14818 Tanggal 22 Oktober 2018, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Thesis**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SUDIRMAN**

NIM : 21692104885

Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S2

Alamat : Jl. Pahlawan Kec. Reteh

Judul Penelitian : **STANDAR PA'BAJI DALAM HUKUM PERKAWINAN
MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KELURAHAN PULAU
KIJANG**

Lokasi Penelitian : **KELURAHAN PULAU KIJANG KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 November 2018 s/d 13 Februari 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 13 November 2018

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Kabid Politik dan Kemasyarakatan,



HARYONO KARIM

Rembina

NIP. 19750421 199403 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN RETEH

Jalan Penunjang Telp. 0768 – 329541
PULAU KIJANG – 29273

REKOMENDASI

NOMOR : 277/REK-RTH/XI/2018

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY) UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 070/BKBPOLMAS/2018/325 tanggal 13 November 2018, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SUDIRMAN**
NIM : **21692104885**
Pangkat Studi/Jenjang : **Hukum Keluarga/ S2**
Alamat : **Jl. Pahlawan Kecamatan Reteh**
Judul Penelitian : **STANDAR PA'BAJI DALAM HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KELURAHAN PULAU KUJANG**
Lokasi Penelitian : **KELURAHAN PULAU KIJANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungan Penelitian dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai Tanggal 13 November 2018 s/d 13 Februari 2019.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran dan Pengumpulan data ini dan terima kasih.

Pulau Kijang, 14 November 2018

An. CAMAT RETEH
SEKRETARIS KECAMATAN



ARBANI, S.Pd.SD

Pembina (IV/a)

0630405 198410 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Sdr. Kepala Kelurahan Pulau Kijang
3. Yang bersangkutan.

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	03/10/2019	BBS I		menyampaikan dan menyebutkan sumber-sumber yang telah digunakan dalam penulisan skripsi.
2.	04/01/2020	BBS II		
3.	02/02/2020	BBS III		
4.	03/02/2020	BBS IV		
5.	07/03/2020	BBS V		
6.	10/04/2020	BBS VI		

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20....

Pembimbing I / Promotor

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	03/10/2019	BBS I		menyampaikan dan menyebutkan sumber-sumber yang telah digunakan dalam penulisan skripsi.
2.	04/01/2020	BBS II		
3.	02/02/2020	BBS III		
4.	03/02/2020	BBS IV		
5.	07/03/2020	BBS V		
6.	10/04/2020	BBS VI		

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20....

Pembimbing II / Co Promotor



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

NIM

PROGRAM STUDI

KONSENTRASI

PEMBIMBING I / PROMOTOR

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

JUDUL TESIS/DISERTASI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Halaman 1 dari 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di bagian atas, tulis sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, atau untuk keperluan lain yang wajar UIN, Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN, Suska Riau.
2. Di bagian bawah, tuliskan dan memberikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA
NIM

PROGRAM

PRODI

KONSENTRASI

: SUDIRMAN

: 21692104885

: MASTER

: HUKUM KELUAGA

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Sabtu 09-06-2018	Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan	Usni Akbar Siregar	
2		No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Masyarakat Al-Syarifah		
3	Sabtu 09-06-2018	Pesegeran Kepemilikan hak-hak Putaka Tinggi Anak dari Hukum Islam (studi kasus pada Masyarakat Gunung Kabupaten Kuantan Singingi)	Nuridin	
4	Sabtu 09-06-2018	Hukum Ayah Menikahi Anaknya yang Lahir Nikah Menurut Mazhab	Kalianora Septia Auli	
5		Hanafi dan Mazhab Syafi'i		
6	Sabtu 09-06-2018	Ekstensi Seksi No Muslim Sebagai alat bukti Dalam Persidangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru	Ahmad Soleh Haxikuan	
7	Sabtu 09-06-2018	Problematika Ijab kabul Melalui Media Komunikasi Kontemporer	Yuib Nisibon	
8	!	Perspektif Empat Mazhab		
9	Sabtu 09-06-2018	Hamil Perkawinan Dalam Perspektif Imam Mazhab	Almi Jera	
10	Sabtu 09-06-2018	Hukum Mengadha Sholeh yang di linggulkan kampung Ulu	Oki Pendra	
11	Sabtu 09-06-2018	Nasyid Dalam komplikasi Hukum Islam Perspektif Imam Syafi'i	Juni Pendra	
12	Sabtu 09-06-2018	Intensitas Pemahaman Masyarakat Desa Parit Utama ke Rumpun hilir	Jusmiati	
13	Sabtu 09-06-2018	Tetapi Menjaga Kebersihan Rumah tangga Kabar Wasiat dari Komperatif antara Imam Malik dan Hukum Keasusman	Neneng	
14	Sabtu 09-06-2018	Dalam Islam		
15				

Pekanbaru,
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag

NIP. 19611230 198903 1 002

NB: Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

atau masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA
NIM

PROGRAM

PRODI

KONSENTRASI

: Gudirman
: 21692104085
: MASTER
: HUKUM KELUARGA
:

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	12/12-2017	Kajian Fiqih Terhadap Amaliyah Khusus Dalam Bulan Hijriyah		Sapandi Marw...
2	12/12-2017	Pemikiran Syaikh Mahmud Syattul Terhadap Kesaksian non Muslim		Ahmad Shaleh...
3	12/12-2017	Datam Kewarisan Janda Di Dalam Kompetensi Hukum Islam Ditinjau Menurut Hukum Kewarisan Islam		Ridwan
4	12/12-2017	Kewarisan Cewe Dalam Kompetensi Hukum Islam Di Indonesia		Wira Kestari
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB**
- Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 - Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar
 - Setiap mahasiswa wajib menyerahkan kartu ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA
NIM

PROGRAM

PRODI

KONSENTRASI

: Sudirman
: 21692104885
: MASTER
: HUKUM KELUARGA
:

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	07-12-2017	Radd Dalam Hukum Waris	Ria Zul Aqkar	
2		(Studi Perbandingan Syafi		
3		dan Kompelasi Hukum Islam.		
4				
5		Studi Terhadap Perubahan	Rizki A.	
6		Pendapat Yusuf Qardhawi		
7		Tentang Warita Haid.		
8				
9		Studi Perbandingan Pendapat	M. ALFIS	
10		Imam Malik dan Imam		
11		Syafi'i Tentang Hak Waris		
12		Pembunuh Akibat Khilaf		
13		Pengaruh Kaedah Usul	M. AKBAR	
14		Fiqih Terhadap Fiqih		
15		Hadist.		

Pekanbaru,
Direktur

20....

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB**
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA
NIM

: SUDIRMAN
: 21692104.885
: MASTER
: HUKUM KELUARGA

PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	11-12-2017	Kosep Walimatul AL-Ursy Dalam Islam (studi Komperatif Walimatul AL-Ursy Empat Imam Mazhab)		
2	PENIN	Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri yang Dili'an		
3		Intensitas Pemahaman Masyarakat Desa Pasir Utama Kecamatan Rambak Hilir Terhadap Menjaga Kerahagaan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam		
4		Kontekstualisasi Sanksi Hukum Bunuh Dalam Kasus Konversi Agama (orang Murtad) Perspektif M. Quraishi Shihab Dalam Tafsir AL-Misbah dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia		
5		Konsep Pemaknaan Sunnah sebagai Praktek Aktual Kehidupan Beragama Rasulullah S.A.W dan para Sahabat Perspektif Kh. Hasyim Asy'ari Serta Implikasinya Terhadap Amaliyah Warga Nahdhiyyin		
6		Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Ketika Nusyuz (studi Komparasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)		

Pekanbaru,
Direktu,

20....

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

NB: Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA
NIM

PROGRAM

PRODI

KONSENTRASI

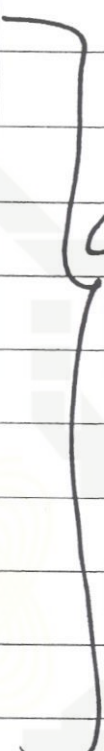
: SLIDIRMAN

: 21692104885

: MASTER

: HUKUM KELUARGA

:

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	12/12/2017 SELASA	The Influence of Using Vocabulary knowledge on Reading Comprehension And Writing Ability		Selvia Angela
2		The management Of Learning Environ- ment By English Teachers At junior High Schools In Tambora District		Zulkitti
3		The Analysis Of The Factors Of The Grammatical And Punctuation Errors In Writing Narrative Text		Tiaud Pandawati
4		English Teachers' Percepation Of Implementing 2013 Curriculum English Teaching Learning Process At Senior High Schools In Sugai Apit District		Ahmad Nurfaiz
5		An Analysis Of The Rules Pronouncing Of Words Suffixes (i/iq/AND/steke		Ovi Arista Erw
6		An Analysis Of Using Cognitive Language Learning Approach (colla) And Sheltered Instruction Observation Protocol (siop) Model"		Deusi Khalida Laila
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

UIN SUSKA RIAU



NAMA
NIM

PROGRAM

PRODI

KONSENTRASI

: SUDIRMAN
: 21692104005
: MASTER
: HUKUM KELUAGA

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	07/12/2017	Konsep Nusyuz (Study Kompendi Imam Syafi' dan Kompelasi Hukum Islam		
2				
3				
4	07/12/2017	Faktor Penyebab dan Implikasi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tambang		
5				
6		Makna Kata Al-Bahrain Dalam Al-Qur'an Dan Korelasinya Dengan Pembuktian Sains		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,
Direktur

20....

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

NB: Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Sudirman
 NIM : 21692104885
 PROGRAM : MASTER
 PRODI : HUKUM KELUARGA
 KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	1/12-2017	Pengaruh kedisiplinan dan kerja guru terhadap hasil bekerja siswa di MTS di Kota Dumai		Syafriah Zulkifli Aris
2		Konsep Budaya Islami Dalam Pendidikan Islam Menurut Haji Abdul Malik Amrullah (Buya Hamka)		Arissyah
3		Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Al-Quran		Abbar-jalil
4		Pengembangan Budaya Religius Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di SMAIT Al-Fityah Dan SMAIT Izzah Rumbai Pekanbaru	Nazri	
5		Pengembangan Budaya Sekolah Dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri Se Kota Pekanbaru		Zulkifli Aris
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,
Direktur

20....

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

NB: Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA
NIM
PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

: SUDIRMAN
: 21692104885
: MASTER
: HUKUM KELUAGA
:

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	6-06-2018	Metode Istimbat Akhbar Al-Nawadz	6/6-18	
2		Wahbah Al-Zuhaili (1932-2015)		
3		Studi Atas Kitab Fatawa Mawasinah		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Muhamad
Faisol

Pekanbaru,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

NB: Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Nama : Ahmad Syarif
NIM : 21692104758
Program : Pasca Sarjana
Prodi : Hukum keluarga
Konsentrasi : Tafsir Hadits

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	20 Juli 2018	Pengaruh kompetensi manajerial kepada sekolah terhadap kinerja guru SDIT Kecamatan Tampan kota Pekanbaru		Abu Wahid Hasbiyan
2	"	Pengaruh kompetensi pada proses guru terhadap implementasi standar proses kurikulum PAI 2018 edisi revisi di sekolah menengah atas negeri kecamatan Tualang kabupaten Siak		Ratna Dewi
3	"	Konsep pendidikan Budi pekerti persepektif KIH. Dewantara		Dendy
4	"	Studi komperatif pemikiran Imam Al- Ghazali barbara Prashntg Tentang "learning style"		Wandura
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20-7-2018
Direktur,

Prof. Dr. Afrizal M. MA
NIP.





NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA
NIM

PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

: Sudirman
: 21692104885
: MASTER
: HUKUM KELUARGA
:

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	24 Juli 2018 Jumat	Pengaruh kompetensi Manajerial kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru		Abdul Wahid Hasyim
2		SDIT Se Kecamatan Tampar kota Pekanbaru		
3				
4		Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Implementasi Standar		Ratna Dewi
5		Proses Kurikulum PAI 2013 Edisi Revisi Di Sekolah Menengah Atas		
6		Negeri Se Kecamatan Tualang Kabupaten Siak		
7				
8		Konsep Pendidikan Budi Pekerti Perspektif K.I.H. Dewan Tara		Dendry Muli
9				
10		Studi Komperatif Pemikiran Imam Al. Ghaazali Dan barbara Anastasy tentang "Leathine styly"		Winda
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20 07 - 20...18
Direktur,



Prof. Dr. H. Afrizal M.MA
NIP.

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

5. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

6. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

7. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

8. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

9. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

10. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

11. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

12. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

13. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

14. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

15. Pengutipan harus mencantumkan sumber.



CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Sudirman
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat, Tanggal Lahir : Benteng, 21 April 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat Lengkap : Jln. Kuantan. II Gg. Palu No. 17
 Kal.Sekip. Kec. Lima Puluh.
Nama Orang Tua
Ayah : H. Dg. Mamase
Ibu : Hj. Marwiah

PENDIDIKAN FORMAL

1994 – 2009 : SD N 1 Pulau Kijang
2000 – 2006 : Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok
 Pasantren Darul Huffadh di Desa Tuju-Tuju
 Kabupaten Bone Sul-Sel kemudian
 mengabdikan 3 tahun di Pondok tersebut.
2011 – 2015 : Program Studi S1 Ah-Syakhsiyyah
 Fakultas Syariah dan Hukum.

PENGALAMAN KERJA

1. Belajar sekaligus Mengajar di Pondok Pesantren Darul Huffadh di Sul-Sel (2006-2008)
2. Mengajar di SD IT Fadhilah Amal (20015-2019)

Pekanbaru, 21 Juni 2019

SUDIRMAN, S.Sy

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.